

Teori dan Aplikasi EKONOMI KELEMBAGAAN bagi Perencana Pembangunan

by Utari Vipriyanti

Submission date: 03-May-2023 09:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2083086842

File name: EBK-00064.pdf (2.75M)

Word count: 23975

Character count: 156194

Teori dan Aplikasi EKONOMI KELEMBAGAAN bagi Perencana Pembangunan



OLEH:
DR. IR. NYOMAN UTARI VIPRIYANTI, Msi

ISBN 978-602-61520-8-4

**Penerbit
Unmas Press**

PRAKATA

46

Puji syukur kami panjatkan dihadapan **Tuhan Yang Maha Esa** atas karunianya **sehingga** Buku berjudul **Teori dan Aplikasi Ekonomi Kelembagaan Bagi Perencana Pembangunan** ini dapat diselesaikan. Seorang Perencana Pembangunan bukan hanya aparat sipil negara namun juga komponen swasta merupakan pihak pihak yang memiliki peran penting dalam upaya pencapaian 17 Goals dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Buku ini diharapkan dapat membantu perencana memahami kelembagaan sehingga rencana yang disusun tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Buku ini sangat tidak sempurna dan hanya kritik, saran dan masukan yang mampu membuatnya semakin sempurna. Terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak hingga buku ini dapat diselesaikan.

Denpasar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	i
Daftar Isi	ii
BAB 1. Sejarah Ekonomi Kelembagaan	3
BAB 2. Definisi Ekonomi Kelembagaan	56
BAB 3. Paradigma Ekonomi Kelembagaan	75
BAB 4. Teori Biaya Transaksi	84
BAB 5. Teori Hak Kepemilikan	95
BAB 6. Teori Modal Sosial	105
BAB 7. Game theory	128
BAB 8. Aplikasi Ilmu Ekonomi Kelembagaan	150
BAB 9. Perencanaan Pembangunan Bali	168
BAB 10. Sumber Kima	192
BAB 11. Organic Farming Beras bali	201
BAB 12. Anggur Buleleng: Naik grade	215
DAFTAR PUSTAKA	226
GLOSARIUM	

BAB 1

Sejarah Ekonomi Kelembagaan

Ikhtisar

Ekonomi kelembagaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Meskipun demikian, cabang Ilmu Ekonomi Kelembagaan sesungguhnya lahir karena kegagalan Ilmu Ekonomi Klasik dan neoklasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, hingga saat ini masih terjadi keragaman pandangan antar penganut aliran ekonomi kelembagaan namun demikian penganut aliran ini

meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial.

Tujuan

Setelah membaca bab ini diharapkan perencana pembangunan dapat:

1. Memiliki gambaran yang utuh mengenai lahirnya cabang ilmu ekonomi kelembagaan.
2. Memahami secara jelas mengenai perbedaan berbagai aliran pemikiran ekonomi.
3. Mengerti mengenai pemikiran aliran ekonomi kelembagaan dan perannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Perjalanan Panjang

Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis

Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara-cara berekonomi.

Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. ²⁵ Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman (diversifikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi yang dikemudian hari dikembangkan oleh Adam Smith.

Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. ²⁵ Konsep

pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Menurutnya, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.

Xenophon seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomikus (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.

Thomas Aquinas (1225-1274) seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi

dua menjadi keadilan distributife dan keadilan konvensasi, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

B. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Merkantilis

Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.

Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah yang mampu mendorong ekspor.

Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar yang mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Peredaran logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro, hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan, yang akhirnya akan meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme.

C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Pisiokrat

10

Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi Merkantilis, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah, dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi.

Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat terdiri dari *classe productive* dari kaum petani, *classe des froprietaires* dari kaum pemilik tanah, *classe sterile* atau *classe stipendile* yang meliputi kaum pedagang dan industriawan dan *classe passieve* adalah kaum pekerja.

Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi adalah teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir

uang (*money is veil*) dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi.

Sumbangan pemikiran ahli Pisiokrat lain seperti Jaques Turgot, mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi yakni teori uang sebagai tabir, dan teori fruktifikasi. Teori uang menjadi tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah penemuan dasar satuan perhitungan atas transaksi barter dengan nilai alat tukar.

D. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik

Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat, secara prinsip tidak berbeda dengan filsafat mazhab pisiokrat, kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional, dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif.

Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi *laissez faire*. Politik ini menunjukkan bahwa keseimbangan bersifat otomatis, dimana masyarakat

senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat *full employment*.

Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu, akan menuju kepada suatu keseimbangan (*equilibrium*). Jadi susunan kehidupan ekonomi didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang-perorangan.

Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah, mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individu yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi klasik memiliki prinsip utama yaitu *laissez faire*.

D.1 Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, Skotlandia pada Tahun 1723, guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh, perhatiannya tertuju pada bidang logika dan etika, yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Quesnay dan Turgot serta Voltaire.

Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab Klasik. Karya besar yang disebut di atas lazim dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh *invisible hand*, pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum.

Teori nilai yang digunakan ⁷ Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan

teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai.

Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah, sedangkan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur, seiring dengan persaingan tingkat laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang *stationer*. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk

berarti meningkatkan tenaga kerja, dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar.

D.2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik J.B. Say, Malthus dan David Ricardo

Jean Batiste Say adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Perancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu *Theorie des Debouchees* (teori tentang pasar dan pemasaran) dan dikenal sebagai Hukum Say (*Say's Law*) yaitu *supply creates its own demand*, tiap penawaran akan menciptakan permintaanya sendiri. Menurut Say dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi “produksi berlebihan” (*over production*) yang sifatnya menyeluruh, begitu juga pengangguran

total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas (pengangguran friksi).

Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 di Inggris, sepuluh tahun sebelum Adam Smith menerbitkan *The Wealth of Nations* dan meninggal tahun 1834. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge, Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Malthus diangkat menjadi *Profesor of History and Political Economy* di East India College. Bagian yang paling penting dalam pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul: *An Essay on the Principle of Population*. Teori Malthus pada dasarnya sangat sederhana. Kelahiran yang tidak

terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung.

Ricardo adalah seorang Pemikir yang paling terkenal diantara para pakar Mazhab Klasik. Ricardo terkenal karena kecermatan berpikir dan metode pendekatan yang digunakan yang hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih rinci dan sistematis. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

E. Sejarah Pemikiran Ekonomi Mazhab Sosialis

Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin *laissez faire* dengan

pengendalian tangan tak kentara (*invisible hand*) dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan *the law of diminishing return*, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa.

Para pengkritik mazhab klasik terutama dari Lauderdale, Sismonde, Carey, List dan Bastiat. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan Muller dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi, sedangkan Bastiat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang, menurut beliau hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia.

Sismonde mengajukan keberatan terhadap teori kependudukan Malthus, dan tidak mungkin dapat

dikendalikan dengan cara-cara yang dikemukakan Malthus, sebab sangat tergantung pada kemauan manusia dan kesempatan kerja, dan kawin yang selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Mesin mempunyai fungsi untuk menggantikan tenaga kerja manusia, aspek mesin tidak selalu mempunyai keuntungan dalam meningkatkan kekayaan bangsa. Carey berpendapat pertambahan modal lebih cepat dari pertambahan penduduk.

Sismonde berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. Muller berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran List bukan pembagian kerja yang paling penting tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam usaha meningkatkan kekayaan bangsa.

Pemikiran John Stuart Mill banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentam yang beraliran falsafah *utilitarian*, bebannya sangat berat dalam mempelajari falsafah,

politik dan ilmu sosial, yang menjadikan mental breakdown. Kritik terhadap ekonomi klasik terutama pada Smith, Malthus dan Ricardo, dipelajari oleh Mill. Sementara itu pemikiran ekonomi sosialis mulai berkembang, dasar sistem ekonomi klasik adalah laissez faire, hipotesis kependudukan Malthus, hukum lahan yang semakin berkurang, teori dana upah mendapat tantangan. Dalam era inilah pemikiran Mill dituangkan dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy, dengan pemikiran yang eklektiknya.

Sumbangan yang paling besar Mill adalah metode ilmu ekonomi yang bersifat deduktif dan bersama dengan metode induktif. Karena hipotesisnya belum didukung dengan data empirik, di samping itu pembahasannya tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas. Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi lain dengan hukum distribusi pendapatan, juga memperkenalkan human capital investment yaitu keterampilan, kerajinan

dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas.

F. Sejarah Pemikiran Ekonomi Mazhab Sosialis Utopis

Sudut pandang pemikiran yang revolusioner dari Karl Marx dan Engel, menyebut pemikiran ini sebagai kaum sosialis ilmiah dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis dengan dipelopori oleh Thomas More, Francis Bacon, Thomas Campanella, Oliver Cromwell, Gerard Winstanley, James Harrington.

Perkataan Utopis berasal dari judul buku Thomas More dalam tahun 1516 Tentang Keadaan Negara yang Sempurna dan Pulau Baru yang Utopis. Francis Bacon dalam bukunya Nova Atlantis (1623), dan Thomas Campanella (1623) dalam bukunya Negara Matahari (Civitas Solis).

Saint Simon (1760-1825), dari Perancis bukunya The New Christianity dan Charles Fourier (1772-1837) bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan kotbah tetapi dengan model percontohan. Louis Blanc mengusahakan agar didirikan ateliers sociaux yakni pabrik-pabrik yang dihimpun negara. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) Beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan.

G. Sejarah Pemikiran Ekonomi Mazhab Sosialis Ilmiah

Karl Marx dilahirkan di Treves Jerman dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta Pemimpin Sosialisme Modern. Ia belajar di Universitas Bonn kemudian di Universitas Berlin di Jerman dan memperoleh sarjana bidang Filsafat. Dalam masa studinya ia banyak dipengaruhi oleh Friedrich Hegel seorang Filosof Besar Jerman bidang falsafah murni.

Friedrich Engels, berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman, keluarganya memiliki sejumlah perusahaan industri tekstil di Jerman maupun di Inggris. Sejak usia muda Engels menaruh minat terhadap ilmu falsafah dan ilmu pengetahuan masyarakat. Nalurinya tergugah oleh apa yang diamatinya dan disaksikannya sendiri mengenai kehidupan masyarakat dalam lingkungan kawasan industri di Jerman dan di Inggris. Engels bertemu dengan Marx tahun 1840 di Paris, sewaktu Marx hidup dalam pembuangan.

Teori tentang perkembangan ekonomi menurut Marx sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi, kedua teori tentang proses kesengsaraan/pemiskinan yang meluas (*die verelendung* atau *increasing misery*), ketiga teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun.

Menurut teori konsentrasi perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan

perusahaan kecil maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin.

Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang, dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat. Sejauhmana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari a) tingkat nilai surplus, b) tingkat produktivitas tenaga kerja, dan c) perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal.

H. Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo Klasik: Perintis Analisis Marjinal

7 Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam

metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (marginal utility). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.

Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II. Hukum Gossen I menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan Hukum Gossen II, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gossen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individu lah yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang

dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi.

⁷ Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Walras tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi

I. Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo Klasik: Teori Produktivitas Marjinal

Dasar pemikiran mazhab neoklasik pada generasi kedua lebih akurasi dan tajam karena bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi pada kelompok generasi pertama neoklasik. Hal ini dapat terjadi karena pemikiran generasi kedua menjabarkan lebih lanjut

perilaku variabel-variabel ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya. Lingkupan telah berkembang dari produksi, konsumsi, dan distribusi yang lebih umum beralih pada penjelasan yang lebih tajam.

Pertentangan pemikiran antara para ahli neoklasik seperti J.B. Clark dapat menjadi sumber inspirasi dari perkembangan ilmu ekonomi dalam menjelaskan teori distribusi fungsional, ditafsirkan oleh J.B. Clark mempunyai nilai etik, yang secara langsung membantah teori eksploitasi. Dengan teori produktivitas marjinal upah tenaga kerja, laba serta lahan dan bunga ditetapkan dengan objektif dan adil. Tetapi masalahnya, apakah setiap pekerja mendapat upah sama dengan produktivitas marjinalnya?

Penggunaan pendekatan matematis dalam analisis ekonomi terutama dalam fungsi produksi semakin teknis, dan dengan penggunaan asumsi-asumsi yang dialaminya juga bertambah seperti dalam kondisi skala tetap, meningkat atau menurun. Hal ini dikaitkan pula dengan bentuk kurva ongkos rata-rata, oleh Wicksell. Hal ini merupakan sumbangan besar dalam

pembahasan ongkos perusahaan dan industri. Pada saat kurva ongkos rata-rata menurun, sebenarnya pada fungsi produksi terjadi proses increasing returns, dan pada saat kurva ongkos naik, pada kurva produksi terjadi keadaan decreasing returns. Selanjutnya, pada saat ongkos rata-rata sampai pada titik minimum, pada fungsi produksi berlaku asumsi constant return to scale.

Pemikiran lain yang menjadi sumber kontroversi seperti pandangan Bohm Bawerk telah menimbulkan kontroversi pula tentang hubungan antara modal dan bunga. Kontroversi ini pun timbul dari pandangan J.B. Clark. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbullah bunga. Tetapi, bunga juga dipengaruhi oleh produktivitas melalui keunggulan teknik. Bohm Bawerk memberikan adanya premium atau agio, karena kebutuhan sekarang lebih tinggi daripada masa datang. Tetapi, Fisher melihat dari arus pendapatan masa depan perlu dinilai sekarang, yang dipengaruhi oleh kekuatan subjektif dan objektif. Fisher menjelaskan pula terjadinya bunga

melalui permintaan dan penawaran terhadap tabungan dan investasi. Fisher memberi sumbangan pula pada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan *marginal rate of return over cost*.

J. Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo Klasik: Pemikiran Marshall sebagai Bapak Ekonomi Neoklasik

Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran pemula dari marginalis dan pemikiran Klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi *ceteris paribus*, sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka

pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang yang tetap.

Pemikiran Alfred Marshall mahir dalam menggunakan peralatan matematika ke dalam analisis ekonomi. Dia memahami, bahwa untuk memudahkan pembaca, maka catatan-catatan matematikanya diletakkan pada bagian catatan kaki dan pada lampiran bukunya. Pembahasannya tentang kepuasan marjinal telah mulai sebelum 1870, sebelum buku Jevons terbit, tetapi karena orangnya sangat teliti dan modes, dia tidak mau cepat-cepat menerbitkan bukunya.

Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai koefisien ini dapat sama dengan satu, lebih besar dan lebih kecil dari satu. Tetapi, ada dua masalah yang belum mendapat penyelesaian dalam hal sisi permintaan, yakni aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan. Robert Giffen telah dapat membantu penyelesaian kaitan konsumsi dan pendapatan dengan

permintaannya terhadap barang-barang, sehingga ditemukan Giffen Paradox. Peranan substitusi kemudian diselesaikan oleh Slutsky.

Marshall menemukan surplus konsumen. Pengertian ini dikaitkan pula dengan *welfare economics*. Bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraannya tidak menurun. Tetapi, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan atau industri.

Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan ketidakstabilan, karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang

menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika kurva penawaran berjalan dari kiri-atas ke kanan-bawah. Jika variabel kuantitas independen, terjadi kestabilan, tetapi jika berubah harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil.

K. Sejarah Pemikiran Ekonomi Mazhab Institusionalisme

Inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi tetapi juga karena motivasi lain (seperti motivasi sosial dan kejiwaan), maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoretis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks.

Revolusi perkembangan pemikiran yang dikemukakan Veblen yaitu dengan memperluas

lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai aspek ilmu sosial sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula Veblen mendapat tuduhan bukan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi sebagai seorang sociologist.

Pandangan pemikiran Veblen yang utama bahwa teori-teori ekonomi ortodoks, seperti teori konsumsi, perilaku bisnis, andaian-andaian laba maksimal, persaingan sempurna ditolakny. Persaingan sempurna hampir tidak terjadi, yang banyak terjadi adalah monopoli, bukan persaingan harga, tetapi harga ditetapkan lebih tinggi. Konflik-konflik yang terjadi bukan lagi antara tenaga kerja dan pemilik modal, tetapi antara bisnismen dengan para teknisi. Karena dunia bisnis telah dikuasai oleh mesin, maka peranan teknisilah yang menentukan proses produksi.

Selanjutnya pandangan Veblen pada tahap awal sukar dipahami oleh ahli-ahli ekonomi, karena dia

menggunakan istilah-istilah yang datang dari disiplin lain. Namun demikian, pandangan-pandangannya telah mendorong berkembangnya aliran ekonomi kelembagaan Amerika Serikat. Murid-muridnya melanjutkan dan melakukan pengembangan terhadap pemikiran-pemikirannya.

L. Sejarah Pemikiran Ekonomi Tindakan Kolektif dan Surplus yang tidak Produktif

Mitchell seorang ilmuwan sejati yang tidak terpengaruh oleh pemikiran lain ia mempunyai pandangan sendiri. Oleh karena itu tidak semua pandangan Veblen disetujuinya, bahkan di samping pemikiran ekonomi ortodoks, pandangan Veblen mendapat kritik. Mitchell berkeberatan terhadap asumsi-asumsi, logika yang abstrak ekonomi ortodoks, karena itu dia tidak pernah menggunakannya sebagai teori dalam penelitian. Dia lebih menekankan penelitian empirik dan menjelaskan data dengan deskriptif. Pendekatan sejarah, dengan mempelajari sebab-sebab yang menjadi kumulatif secara

evolusioner digunakannya dalam analisis siklus bisnis. Fluktuasi kegiatan ekonomi dapat diamati dari keputusan-keputusan pengusaha, reaksi-reaksi pengusaha terhadap perubahan laba. Siklus-bisnis terdiri beberapa tahap, yakni resesi, depresi, pemulihan dan masa-masa makmur (boom).

John R. Commons seorang pelopor ajaran ekonomi kelembagaan di Universitas Wisconsin. Commons mencoba untuk melakukan perubahan sosial, penyempurnaan struktur dan fungsi pendidikan di kampusnya, dan banyak memberikan sumbangan dalam ekonomi perburuhan. Pandangannya terhadap ekonomi ortodoks adalah penolakannya pada lingkungan ekonomi yang sempit, statik, dan mencoba memasukkan segi-segi kejiwaan, sejarah, hukum, sosial dan politik dalam pembahasannya. Teori harga dalam ekonomi ortodoks hanya berlaku dalam kondisi-kondisi khusus. Dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi tiga macam transaksi dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi

kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut, melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum dan kejiwaan.

Pandangan pemikiran J.A. Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodok, yaitu ada tiga kelemahan teori ekonomi ortodoks yang ditemukannya, yakni tidak dapat menyelesaikan masalah full employment yang dijanjikan teori ekonomi ortodoks, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial. Adanya ekonomi normatif dan positif tidak disetujuinya, oleh karena keduanya mengandung unsur etika, hipotesis tentang timbulnya imperialisme, karena terjadi under consumption dan over saving di dalam negeri, maka diperlukan penanaman modal ke daerah-daerah baru. Pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mendorong ekonomi ke arah full employment, dan meningkatkan pendapatan pekerja dan peningkatan produktivitas. Pembayaran terhadap faktor-faktor produksi dapat ditentukan atas kebutuhan cukup untuk meningkatkan produktivitas dan dengan memberikan

kelebihan yang tidak produktif. Dengan semakin meratanya pembagian pendapatan akan mendorong peningkatan produktivitas, meningkatnya konsumsi, dan akan terhindarlah ekonomi dari resesi.

M. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Amerika

Pemikiran yang paling menonjol dari Schumpeter tentang pembahasan ekonomi jangka panjang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus-bisnis. Keseimbangan ekonomi yang statik dan stasioner itu mengalami gangguan dengan adanya inovasi, namun gangguan itu berusaha mencari keseimbangan baru. Inovasi akan terhenti kalau kapten industri (wiraswasta) telah terlihat dengan persoalan-persoalan rutin. Walaupun Schumpeter menggunakan andaian-andaian ekonomi ortodoks, tetapi dia memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi bisnis, di mana terjadi resesi, depresi, recovery, dan boom. Inovasi dan inovasi

merupakan kreativitas yang bersifat destruktif. Penemuan hari ini dapat dihancurkan oleh penemuan esok, tetapi ekonomi tetap tumbuh.

Pemikiran Gunnar Myrdal seorang ekonomi Swedia yang terbesar dewasa ini tertarik dengan pengkajian sosiologi. Dia mempelajari sebab-sebab terjadinya kemiskinan di negeri-negeri maju dan yang sedang berkembang. Dalam mengatasi persoalan-persoalan itu tidak dapat hanya dengan teori-teori ekonomi ortodoks, oleh karena teori itu terlalu sempit. Perencanaan ekonomi di negeri-negeri yang sedang berkembang akan mengarahkan pembangunan yang jelas, dan perencanaan itu meliputi segala aspek, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan semua sektor. Alat analisisnya seperti yang dilakukan oleh Mitchell, yakni sebab-musabab yang bersifat kumulatif. Jadi, kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial dan kejiwaan dapat berhimpun menjadi sebab kejadian yang merugikan atau yang menguntungkan pembangunan.

John Keyneth Galbraith menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalis di AS, yang tidak sesuai dengan ramalan-ramalan yang bersifat manipulatif dari teori ekonomi ortodoks. Andaian-andaian ekonomi ortodoks menurut Galbraith ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada lagi persaingan sempurna, pasar telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini menentukan selera konsumen. Kekuasaan konsumen telah tidak berarti sehingga timbul dependent-effect pemilik modal telah terpisah dengan para manajer yang profesional, dan para manajer ini telah menjadi technostructure masyarakat. Konsumsi masyarakat telah menjadi tinggi, tetapi sebaliknya terjadi pencemaran lingkungan, dan kualitas barang-barang swasta tidak dapat diimbangi oleh barang-barang dan jasa publik. Kekuatan-kekuatan perusahaan besar dikontrol oleh kekuatan pengimbang seperti kekuatan buruh, pemerintah, dan lembaga-lembaga konsumen. Namun demikian, untuk menjamin kelanjutan

kekuasaan perusahaan-perusahaan ini, mereka meminta pemerintah untuk menstabilkannya.

Runtuhnya Kedigjayaan Aliran NeoKlasik

Krisis Ekonomi yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia pada tahun 2007 sesungguhnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh kinerja perekonomian saja melainkan ada faktor lain yang menjadi penyebabnya yaitu hilangnya Trust karena dilanggarnya norma-norma yang selama ini diyakini oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Ditinjau dari sisi ekonomi, mungkin saja proses pemulihan krisis tersebut telah menunjukkan hasil namun dampaknya terhadap hilangnya rasa kepercayaan masyarakat masih saja tampak di hadapan kita. Sebut saja salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap berbagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi keamanan, keuangan khususnya pajak maupun lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi demokrasi.

Hal tersebut terjadi pula di berbagai negara di dunia. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara adi kuasa yang menjalankan paham neoklasik berlangsung berkepanjangan. *Invisible Hand* yang diharapkan hadir ternyata tidak muncul-muncul jua. *Invisible Hand* yang diyakini oleh paham Neoklasik mengharamkan campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, meskipun untuk kebaikan. Padahal bagi penganut paham ekonomi yang berseberangan dengan paham Neoklasik menyatakan bahwa banyak kemudharatan yang terjadi akibat penerapan paham tersebut khususnya di negara berkembang seperti: (1) Ketimpangan distribusi pendapatan; (2) Kerusakan Lingkungan; dan (3) Hilangnya norma-norma kebersamaan yang sebelumnya lahir di masyarakat.

Ekonomi Kelembagaan Lama dan Baru

Memahami sejarah tentang ekonomi kelembagaan ternyata sangat sederhana. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan

terhadap aliran ekonomi sebelumnya yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi khususnya di negara berkembang. Dalam buku *Economics in The Future* (1976), digambarkan dengan jelas alasan-alasan serta pendapat yang menginginkan adanya pertimbangan kelembagaan dalam memahami ekonomi suatu negara. Keyakinan ini diperkuat oleh tulisan Omerod (1994) dalam bukunya yang berjudul *the death of economics*. Omerod menyatakan bahwa aliran Neoklasik banyak memberikan pandangan yang menyengsarakan masyarakat di berbagai Negara karena bagaimanapun negara berkembang belum memiliki dukungan kelembagaan yang kuat sehingga campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneterinya tetap diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata

Ekonomi kelembagaan lama dimulai saat Thorstein Veblen mengkritisi asumsi dasar teori kegunaan marginal. Aliran ekonomi kelembagaan lama muncul pada pertengahan abad ke dua puluh. Ketenaran Veblen dengan gaya ekonomi kelembagaan

lama memudar di abad ke duapuluh yang pertengahan yang ditandai dengan menguatkan pengaruh Ronald Coase dan Oliver Williamson. Dikatakan bahwa aliran baru muncul pada akhir abad ke dua puluh. Secara umum, aliran ekonomi kelembagaan baru ditandai dengan masuknya analisis ekonomi dalam memahami kelembagaan.

Lebih secara rinci, Veblen membandingkan teknokrasi dengan kapitalisme. F.A. Hayek juga membandingkan teknokrasi dengan kapitalisme. Kedua-duanya, Veblen dan Hayek menerangkan institusi dengan berbeda mindsets. Coase memusatkan perhatian pada biaya-biaya transaksi. Penekanan pada biaya-biaya transaksi oleh Coase mendorong suatu program analisis komparatif mengenai kelembagaan.

Veblen yang terkenal dengan kritiknya terhadap *marginal utility* ternyata memiliki kesamaan dengan Hayek dalam memandang peran teknokrat untuk mensejahterakan masyarakat. Kaum teknokrat dapat mendorong pertumbuhan industri tanpa bantuan pemilik modal tetapi pemilik modal tidak dapat

mengembangkan industri tanpa teknokrat. Tetapi bukan berarti bahwa teknokrat dapat menggantikan pemilik modal.

Kadangkala, teknokrat tidak memahami perannya sehingga menjadi pekerja yang tunduk pada perintah pemilik modal saja. Hal ini tentunya akan membawa masyarakat pada kemunduran. Hal lain yang memberi arti penting adalah penolakan Veblen terhadap segala bentuk agen yang menjadi representasi suatu lembaga.

Pemikiran Ekonomi Klasik dan Neoklasik sudah berkembang dengan pesat dan mengakar kuat dalam komunitas para intelektual dan akademisi. Satu hal yang mendorong penguatan tersebut adalah dasar analisis kuantitatif yang sulit untuk diperdebatkan. Sebaliknya dengan paham pemikiran ekonomi kelembagaan. Bertitik tolak dari ilmu sosial, maka pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan relatif kurang kuat dalam analisis kuantitatif. Namun demikian, masuknya pemikir-pemikir ekonomi dalam aliran ekonomi kelembagaan ini diharapkan dapat memberi landasan yang kuat dalam analisis kuantitatif sehingga

kajian-kajian yang dilakukan tidak lagi menimbulkan banyak perdebatan.

Menurut Williamson sendiri, istilah New Institutional Economics (NIE) digunakan untuk memisahkan dengan istilah lain, yakni Old Institutional Economics (OIE), yang dipelopori oleh Common dan Veblen. Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan memengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni. Pendekatan ini murni beroperasi di luar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif, di mana dari pendekatan kuantitatif tersebut biasanya suatu generalisasi diambil atau pilihan-pilihan kebijakan yang tepat dapat dibuat.

⁶ Kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi (production externalities), dan barang-barang publik (public goods) diidentifikasi sebagai sumber terpenting terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran

kelembagaan non-pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan neoklasik, ketiga variabel di atas diasumsikan tidak eksis, sehingga biaya-biaya transaksi (transaction costs) yang diasosiasikan dengan variabel tersebut dianggap tidak ada. Di samping itu, literatur NIE juga menambahkan beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan (institutional failures) yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (rules of third party enforcement) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar.

Ekonomi neoklasik –sebaliknya- mengabaikan secara total peran kelembagaan; diasumsikan pelaku-pelaku ekonomi beroperasi dalam ruang yang bebas nilai (vacuum). Oleh karena itu, NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi

neoklasik. Dengan kata lain, di bawah NIE beberapa asumsi yang tidak realistis dari neoklasik (seperti informasi yang sempurna, tidak ada biaya transaksi/zero transaction costs, dan rasionalitas yang lengkap) diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi (self-seeking individuals) untuk memperoleh kepuasan maksimal tetap diterima. Selebihnya, kelembagaan dimasukkan sebagai rintangan tambahan di bawah kerangka kerja NIE.

Kunci perbedaan antara OIE dan NIE adalah bahwa pendekatan yang pertama ¹⁵ sangat memfokuskan kajiannya mengenai 'kebiasaan' (habit). Bagi para ahli OIE, kebiasaan/perilaku dianggap sebagai faktor krusial yang akan menentukan formasi dan sustenance kelembagaan. Sebaliknya, di ujung spektrum lain yang berseberangan, NIE lebih memberikan perhatian kepada kendala yang menghalangi proses. Pada akhirnya, NIE (dan ekonomi biaya transaksi) membangun gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi,

meminimalisasikan biaya menyeluruh (bukan hanya ongkos penciptaan/ pengondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antarindividu. Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan, seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi bagi perilaku individu yang rasional dan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu yang berada dalam aturan main tersebut (from individuals of institutions), dengan menganggap individu sebagai apa adanya (given). Pendekatan ini kemudian dideskripsikan sebagai ‘methodological individualism’.

Penting pula untuk dicatat, bahwa NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) pada level makro dan kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*) pada level mikro. Williamson mendeskripsikan institutional environment ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal

yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari kebijakan ekonomi. Sebaliknya, level analisis mikro berkuat dengan masalah tata kelola kelembagaan (institutions of governance). Singkatnya, institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan institutional arrangement, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah. Dengan begitu, menurut Williamson, kesepakatan kelembagaan merujuk kepada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar, pasar bayangan (quasi-market), maupun model kontrak yang memakai hirarkhi. Jadi, fokusnya adalah transaksi individu dan pertanyaan berkaitan dengan bentuk organisasi (integrasi vertikal versus out-contracting) dianalisis pula. Bagi Williamson,

kesepakatan kelembagaan mungkin istilah yang paling mendekati dengan istilah yang terpopuler disebut sebagai ‘kelembagaan’.

Nabil dan Nugent mengklasifikasikan ide NIE ke dalam dua mazhab utama: aliran biaya transaksi (*transaction cost school*) dan aliran tindakan kolektif (*collective action school*). Aliran kedua ini diasosiasikan dengan tulisan Mancur Olson, Eleanor dan Vincent Ostrom, serta yang lainnya; yang mencoba mengeksplorasi keadaan di mana pelaku ekonomi akan memperoleh keberhasilan bila melakukan kerjasama, baik dalam domain ekonomi maupun politik. Hal ini sekaligus dapat memberikan bukti, sebagai contoh, bahwa usaha tani yang dikontrol oleh petani lebih mungkin berhasil dalam menyediakan jasa pemasaran bagi para anggotanya. Tetapi, pandangan ini tetap akan berkonsentrasi kepada mazhab biaya transaksi, yakni merefleksikan sifat individu dari pelaku ekonomi kecil (*smallholder*) dan kegiatan pemasaran pedagang. Seluruh definisi tersebut, baik OIE maupun NIE, memasukkan konsep yang secara relatif lebih luas.

Definisi itu bukan hanya secara sederhana berbicara mengenai organisasi, seperti korporasi, bank, dan universitas; tetapi juga mengintegrasikan dan mewujudkan sistematika sosial, misalnya uang, bahasa, dan hukum.

Akhirnya, sebagai hasil dari ekspansi ilmu ekonomi ke wilayah ilmu sosial, khususnya hukum, politik, dan sosiologi, NIE secara definitif merupakan sebuah studi multidisipliner yang memiliki beberapa cabang ilmu. Meskipun masih terdapat beberapa perdebatan tentang wilayah kajian dari NIE itu sendiri, namun setidaknya cabang-cabang dari NIE bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama, apa yang dikenal sebagai ‘sejarah ekonomi baru’ (*new economic history*, dikembangkan oleh North, Fogel, dan Rutherford) dan aliran pilihan publik (*public choice school*, diperkenalkan oleh Buchanan, Tullock, Bates, dan Olson), yang berfokus pada analisis makro (*institutional environment*). Kedua, teori ‘ekonomi biaya transaksi’ (*transaction cost economics*, diintroduksi oleh Ronald Coase, Oliver Williamson,

dan Douglass North) dan ‘informasi ekonomi’ (*economics information*, dikaji oleh Akerlof, Stigler, dan Stiglitz), sekadar menyebut sebagian, yang berfokus pada analisis mikro (*institutional arrangement*) dan bentuk-bentuk tata kelola (*forms of governance*) aktivitas ekonomi (Kherallah dan Kirsten, 2002:6-7). Di luar itu, masih terdapat beberapa cabang lain yang cukup menggugah untuk menjadi bahan kajian, seperti teori ekonomi sosial (*new social economics*) yang dikembangkan oleh Gary S. Becker, teori tindakan kolektif (*collective action theory*) yang diperkenalkan oleh Mancur Olson, dan teori hukum dan ilmu ekonomi (*law and economics*) yang diusung oleh Posner.

Pendalaman Materi

1. Mengapa aliran ekonomi kelembagaan berkembang di era ini?
2. Jelaskan peran Thorstein Veblen dalam perkembangan pemikiran ekonomi kelembagaan

3. Seorang perencana pembangunan diharapkan memahami konsep konsep ekonomi kelembagaan agar hasil hasil pembangunan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Mengapa demikian?
- 4.

BAB 2

Definisi Ekonomi Kelembagaan

diubah.

Kelembagaan tradisinal, dalam banyak hal merupakan respon terhadap ortodoksi ekonomi yang diintroduksi kembali dalam bentuk kelembagaan ekonomi politik sehingga merupakan tantangan yang eksplisit

Ikhtisar

Seringkali kita menghadapi kesulitan saat seseorang bertanya tentang definisi kelembagaan. Hambatan tersebut lebih banyak disebabkan karena kita terjebak pada proses penghafalan bukan pada memaknai apa yang dimaksud dengan kelembagaan. Bab ini berusaha memberikan penjelasan yang lengkap tentang berbagai definisi ekonomi kelembagaan yang merupakan rangkuman berbagai pendapat para ahli.

Tujuan

Penjelasan dari bab ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan berbagai definisi dan batasan para ahli mengenai ekonomi kelembagaan.
2. Membantu perencana pembangunan untuk mampu memberikan batasan mengenai ekonomi kelembagaan dengan bahasanya masing-masing.

MEMAHAMI ILMU EKONOMI KELEMBAGAAN

Perkembangan pemikiran mengenai cabang ilmu ekonomi kelembagaan dirasakan cukup menggembirakan. Douglass C. North menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Kelembagaan dibentuk oleh *formal constraints* berupa *rules*, *laws*, dan *constitutions*; dan *Informal constraints* berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan melalui upaya untuk menanggalkan asumsi rasionalitas yang

mendasari kaum neoklasik. Meskipun demikian kelompok ekonomi kelembagaan masih tetap menggunakan asumsi kelangkaan dan persaingan yang digunakan oleh kaum neoklasik. Penanggalan asumsi rasionalitas tersebut akan membawa ekonomi kelembagaan kepada proses eksplorasi kelembagaan non-pasar (hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk memberi kompensasi terhadap kegagalan pasar. North bersama dengan Fogel menerima Nobel pada Tahun 1993. keberhasilan meraih nobel tersebut membuka pencerahan bagi aliran ekonomi kelembagaan sehingga semakin dikenal.

Ekonomi Kelembagaan sesungguhnya berfokus pada peran proses evolusi dan peran institusi dalam membentuk perilaku ekonomi. Fokus ini berawal dari dikotomi naluri Thorstein Veblen yaitu teknologi di satu sisi dan kebiasaan masyarakat di sisi lain.

Walton H. Hamilton menyatakan bahwa ekonomi kelembagaan menekankan pada studi yang lebih luas dari sekedar lembaga dan pasar. Ekonomi

kelembagaan baru yang berkembang di abad ke-20, mengintegrasikan ekonomi neoklasik ke dalam analisis pembangunan. Aspek hukum dan ekonomi menjadi tema utama dari ekonomi kelembagaan sejak John R. Commons mempublikasikan bukunya yang berjudul *Legal Foundation of Capitalism* pada tahun 1924. Ciri utama lainnya dari ekonomi kelembagaan adalah perilaku ekonomi yang didasari oleh apa yang diketahui tentang psikologi dan ilmu kognitif dibandingkan dengan sekedar asumsi sederhana dari perilaku ekonomi.

Kritik terhadap aliran institusional menyatakan bahwa konsep "lembaga" menjadi sangat sentral untuk semua ilmu sosial. Hal tersebut kadang-kadang sulit dimengerti secara cepat. Sebagai konsekuensi dari sulitnya memahami makna dari konsep "lembaga" telah mengakibatkan timbulnya debat yang membingungkan dan tidak pernah berakhir tentang "institusionalis" tersebut. Kebingungan yang sama juga terjadi saat memahami hal-hal yang menjadi inti dari teori kelembagaan. Dengan kata lain, ekonomi kelembagaan

telah menjadi begitu populer sejak Veblen, Hamilton dan Ayres sangat menekankan pada pentingnya teknologi sedangkan institusi memiliki tempat yang sekunder dalam teori mereka.

Kelembagaan ekonomi berfokus pada *learn*, *bounded rationality*, dan *evolution*. Para *institutionalis* memandang Karl Marx sebagai pencetus tradisi institutionalist, karena ia menggambarkan kapitalisme sebagai sistem sosial yang terbatas. Meskipun ekonom kelembagaan lain tidak setuju dengan definisi Marx tentang kapitalisme, namun pasar, uang dan kepemilikan pribadi dari faktor-faktor produksi memang berkembang dari waktu ke waktu.

Kelembagaan Tradisional menolak untuk mereduksi institusi sebagai sesuatu keinginan yang sederhana, teknologi, dan alamiah. Sesuai dengan harapan masa depan, selera, kebiasaan, dan motivasi, tidak hanya menentukan sifat institusi tetapi juga membatasi dan membentuk institusi tersebut. Jika orang hidup dan bekerja dalam suatu lembaga-lembaga yang teratur, maka keteraturan tersebut akan mampu

membentuk pola pikir mereka. Pada dasarnya, kelembagaan tradisional menekankan dasar hukum dari ekonomi, proses evolusi, kebiasaan, dan kemauan dengan mana lembaga yang didirikan dan kemudian untuk ekonomi neoklasik, karena didasarkan pada premis fundamental bahwa aliran neo-klasik menentang: bahwa ekonomi tidak dapat terpisah dari sistem politik dan sosial di mana ia tertanam. Beberapa penulis yang terkait dengan aliran ini termasuk Robert Frank, Warren Samuels, Mark Tool, Geoffrey Hodgson, Daniel Bromley, Jonathan Nitzan, Shimshon Bichler, Elinor Ostrom, Anne Mayhew, John Kenneth Galbraith dan Gunnar Myrdal, tapi bahkan sosiolog C. Wright Mills sangat dipengaruhi oleh pendekatan kelembagaan dalam studi utamanya.

Thorstein Veblen dengan artikel utamanya: Teori Kelas Leisure. Thorstein Veblen berasal dari pedesaan Amerika Tengah-Barat dan keluarga imigran Norwegia. Thorstein Veblen (1857-1929) menulis bukunya yang pertama dan paling berpengaruh ketika ia berada di Universitas Chicago, tentang Teori Kelas

Leisure (1899). Di dalamnya ia menganalisis motivasi dalam kapitalisme yang mampu mendorong konsumsi kekayaan mereka sebagai cara untuk menunjukkan keberhasilan. Rekreasi adalah fokus lain kritik Veblen's. Konsep konsumsi berlebihan adalah bertentangan langsung dengan pandangan neoklasik bahwa kapitalisme adalah efisien. Kedua buku yang diciptakan oleh Veblen fokus pada kritik terhadap konsumerisme dan keuntungan.

Mulai tahun 1920 dan setelah Wall Street Crash tahun 1929 peringatan Thorstein Veblen tentang kecenderungan untuk konsumsi boros dan perlunya menciptakan lembaga keuangan yang sehat tampak mendekati kebenaran. Veblen tetap menjadi kritikus terkemuka, yang memperingatkan terhadap ekseseks dari "cara Amerika".

John R. Commons (1862-1945), seorang ahli yang berasal dari Amerika Barat. Ide-idenya menekankan pada konsolidasi di Kelembagaan Ekonomi (1934) yaitu konsep perekonomian yang menekankan hubungan antara manusia dengan

berbagai kepentingan yang berbeda. Ada monopoli, perusahaan besar, perselisihan perburuhan dan siklus bisnis fluktuatif. Namun mereka tidak memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Pemerintah, dalam pemikiran yang bebas, harus menjadi mediator antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Commons sendiri mencurahkan banyak waktu untuk pekerjaan konsultasi dan mediasi di pemerintah dan komisi industri.

Wesley Clair Mitchell (5 Agustus 1874 - 29 Oktober 1948) adalah seorang ekonom Amerika yang dikenal untuk bekerja empiris tentang siklus bisnis dan untuk membimbing Biro Riset Ekonomi Nasional di dekade pertama. Mitchell guru termasuk ekonom Thorstein Veblen dan JL Laughlin dan filsuf John Dewey.

Clarence Ayres (6 Mei 1891 - 24 Juli 1972) adalah pemikir utama dari apa yang beberapa telah disebut sebagai aliran ekonomi kelembagaan Texas. Ayres dikembangkan dengan ide-ide Thorstein Veblen dengan dikotomi dari "teknologi" dan "lembaga" untuk

memisahkan inventif dari aspek struktur ekonomi warisan. Dia mengklaim teknologi yang selalu selangkah lebih maju dari lembaga-lembaga sosial-budaya.

Adolf A. Berle (1895-1971) adalah salah satu penulis pertama yang menggabungkan analisa hukum dan ekonomi, dan karyanya merupakan pilar pendiri pemikiran dalam tata kelola perusahaan modern. Seperti Keynes, Berle berada di Konferensi Perdamaian Paris, 1919, tetapi kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan diplomatik karena tidak puas dengan syarat Perjanjian Versailles. Dalam bukunya yang ditulis bersama dengan Gardiner C. Means, *The Modern Corporation and Property* Swasta (1932), ia merinci evolusi dalam perekonomian kontemporer bisnis besar, dan berpendapat bahwa mereka yang dikendalikan perusahaan-perusahaan besar harus lebih baik apabila diadakan pertanggungjawaban publik. Berle berpendapat bahwa direksi tidak akuntabel karena itu perusahaan cenderung untuk menyalurkan keuntungan perusahaan

ke dalam kantong mereka sendiri, serta mengelola kepentingan mereka sendiri. Kemampuan untuk melakukan hal ini didukung oleh fakta bahwa mayoritas pemegang saham di perusahaan publik yang besar adalah individu tunggal.

John Kenneth Galbraith (1908-2006) bekerja di pemerintahan New Deal Franklin Delano Roosevelt. Meskipun ia menulis kemudian, dan lebih berkembang daripada para ekonom kelembagaan sebelumnya, Galbraith sangat kritis terhadap ekonomi ortodoks sepanjang abad kedua puluh akhir. Dalam Masyarakat (1958), Galbraith berpendapat kelompok yang telah mencapai kekayaan materi tertentu mulai untuk memberikan suara terhadap kebaikan bersama. Dia menyatakan istilah "kebijaksanaan konvensional" untuk merujuk pada ide-ide ortodoks yang mendukung konsensus konservatif yang dihasilkan. Dalam era bisnis besar, tidak realistis untuk memikirkan pasar dari jenis klasik.

BERBAGAI DEFINISI DAN BATASAN ILMU EKONOMI KELEMBAGAAN

Batasan Kelembagaan Douglass C. North

¹⁷ Menurut North, perekonomian akan bergerak apabila ada institusi yang jelas mengatur mengenai kontrak dan kerjasama ekonomi antara pelaku ekonomi tersebut (North dan Thomas, 1973). Kelembagaan adalah aturan dan norma dalam masyarakat yang menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau kewajiban yang harus atau tidak harus dilakukan. Bagi North, institusi adalah aturan permainan dalam suatu organisasi (tempat bermain). Oleh karenanya, kelembagaan bersifat lebih memaksa agar suatu kegiatan ekonomi memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada Tahun 1994, North menyatakan bahwa motivasi dan kemauan manusia merupakan dua hal

penting dalam membangun kelembagaan. Kedua hal tersebut akan mampu membangun kelembagaan yang memiliki fondasi kuat untuk menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi.

Definisi Menurut Lionel Robin

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai definisi dari kelembagaan maupun ekonomi kelembagaan. Namun demikian, secara umum ekonomi kelembagaan dapat dinyatakan sebagai aturan main dalam ekonomi, politik dan interaksi sosial (*Institutions Economic is “the rules of the game in economic, political and social interactions*). Kelembagaan sendiri sering pula didefinisikan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang memfasilitasi koordinasi atau hubungan antar individu³⁹ (*A set of formal and informal rules of conduct that facilitate coordination or govern relationships between individuals*).³⁷ Pendapat ini diperkuat oleh Robin (2005), yang berpendapat bahwa “institutions

determine social organization". Jadi, kelembagaan merupakan wadah tempat organisasi-organisasi hidup.

Definisi lain yang dinyatakan oleh Mubyarto mengenai ekonomi kelembagaan adalah analisa yang memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya di masyarakat yang dipelajarinya. Ekonomi kelembagaan berada di luar fokus ekonomi umumnya yaitu pasar dan menekankan pada hubungan yang terbangun antar manusia. Lebih jauh dinyatakan bahwa ekonomi kelembagaan mempelajari dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi, dan sebaliknya, pengembangan kelembagaan untuk merespon pengalaman-pengalaman ekonomi sehingga kelembagaan dapat menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang akan didapatkan.

Makna kelembagaan dalam ekonomi kelembagaan

1. Menurut Bardhan

Kelembagaan merupakan aturan-aturan sosial, kesepakatan (*conventions*) dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial.

2. Menurut Commons

Kelembagaan merupakan pencapaian dari proses formal dan informal dari resolusi konflik.

3. Menurut Manig

Kelembagaan merupakan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri.

4. Menurut North

Kelembagaan merupakan aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang dari manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial.

5. Makna Lain

- a. Kelembagaan³⁶ sebagai kerangka hukum atau hal-hak alamiah (*natural right*) yang mengatur tindakan individu
- b. Kelembagaan³⁶ sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi (*economic behavior*).

KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN

1. Menurut Challen, karakteristik kelembagaan terdiri dari :
 - a. Kelembagaan secara sosial membedakan setiap rintangan atas perilaku manusia seperti rintangan biologis (*biological constraints*) dan rintangan fisik (*physical constraints*).
 - b. Kelembagaan merupakan aturan-aturan formal, konvensi informal dan tata perilaku (*codes of behavior*).

- c. Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu atau dihalangi.
- d. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan (*prohibitions*) dan persyaratan-persyaratan (*conditional permissions*).

2. Menurut Kapp, karakteristik kelembagaan terdiri dari :

- a. Adanya kritik umum terhadap anggapan awal (*preconceptions*) dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional (konvensional).
- b. Pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosiokultural sebuah hubungan (*socio-cultural network of relationship*).
- c. Penerimaan umum atas prinsip aliran sebab akibat (*circular causation*) sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses

ekonomi, termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan.

ASPEK EKONOMI KELEMBAGAAN

Aspek ekonomi kelembagaan menurut Samuels sebagai berikut :

1. Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis (*authomatic adjustment mechanism*) lewat perubahan-perubahan dalam sistem harga.
2. Ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan mengenai pasar bebas dan pasar efisien (*free and efficient market*)
3. Ekonomi kelembagaan menganggap bahwa faktor teknologi dapat menentukan ketersediaan

dan keterjangkauan sumber daya fisik (*physical resources*).

4. Ahli kelembagaan menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dalam keragaman hubungan yang hidup di masyarakat.
5. Teori kelembagaan merupakan nilai (*value*) yang tidak melihat harga-harga relatif (*relative prices*), tetapi nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial dan perilaku.
6. Ekonomi kelembagaan menganggap bahwa individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai sehingga mereka cenderung bertindak kolektif daripada secara pribadi-pribadi.

7. Ahli ekonomi kelembagaan dapat dikatakan lebih plurastik dan demokratis dalam orientasinya.
8. Ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang menyeluruh (*holistic way*) dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner.

Pendalaman Materi

1. Jelaskan benang merah dari berbagai definisi ilmu ekonomi kelembagaan yang berkembang.
2. Bagaimanakan perjalanan ekonomi kelembagaan hingga menjadi suatu aliran pemikiran baru dalam ranah ilmu ekonomi?
3. Cobalah mendefinisikan kembali mengenai ekonomi kelembagaan tersebut?
- 4.

BAB 3

Paradigma Ekonomi Kelembagaan

Ikhtisar

Memahami ekonomi tidak sesederhana yang dibayangkan dan dapat digambarkan dengan persamaan ataupun grafik-grafik saja. Ekonomi memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif karena aktivitas ekonomi sesungguhnya sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menyempurnakan paradigma yang telah ada agar proses pembangunan mampu menghantarkan Bangsa Indonesia pada suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi kelembagaan baru, adalah sebuah paradigma yang berkembang pesat belakangan ini. Paradigma ini menyediakan alternatif framework dalam analisis ekonomi yang mengkombinasikan ekonomi, hukum, teori organisasi, ilmu politik, sosiologi, anthropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memahami berjalannya suatu masyarakat dan pengaruhnya dalam perilaku ekonomi.

Tujuan

Bab ini diharapkan memampukan pembaca dalam memahami:

1. Kompleknya sistem ekonomi
2. Paradigma ekonomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan sebagai suatu Paradigma Multidisiplin

Ekonomi kelembagaan Baru menekankan pada bagaimana suatu kelembagaan dibentuk yang berdampak pada perubahan berbagai keinginan individu menjadi keinginan kelompok. Oleh karenanya, tidaklah cukup memahami paradigma ekonomi kelembagaan hanya melalui satu disiplin ilmu saja meskipun pemahaman dasar tetap saja diberikan oleh paham ekonomi.

Ekonomi Kelembagaan Baru menawarkan suatu *framework* yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dibandingkan *framework* Neo Klasik. Kenyataannya, kelembagaan menyediakan

aturan dan ketentuan hukum yang mengatur perilaku dan aktivitas manusia dalam pengambilan keputusan. Hal yang paling menarik perhatian dalam pembahasan ekonomi kelembagaan adalah mengenai hak kepemilikan, masalah kontrak, norm, etik, moral suatu masyarakat.

Ekonomi kelembagaan baru, memberikan dua pandangan yang berbeda yang membuat pembahasannya semakin menarik dibandingkan Neo Klasik Ekonomi terutama pertimbangannya terhadap *sustainability*. *Pertama*, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisiplin dalam menganalisis masalah ekonomi. Hal ini lebih mendekati keadaan nyata karena masalah ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan sosial manusia dan tidak mungkin dipelajari secara parsial. *Kedua*, New Institutional Economics menekankan pada sistem legal dan hukum sebagai determinan utama dari perilaku ekonomi dan outcome dari aktivitas ekonomi.

Pandangan tersebut telah diterapkan sejak awal dalam kehidupan manusia.

Asumsi utama dalam kerangka pikir ekonomi adalah *phenomena* ekonomi mengandung makna kompleksitas bukan hal yang sederhana seperti yang umumnya digambarkan dalam grafik aliran Neo Klasik Ekonomi. Pendekatan ini merujuk pada fokus ekonomi yang kompleks yang memandang keterlibatan seluruh komponen dalam sistem kehidupan.

Paradigma kompleksitas memandang dunia sebagai sebuah kehidupan bukan sebuah mesin yang statik. Dunia selalu dinamis. Memahami dunia nyata sebagai sesuatu yang kompleks akan lebih mudah dilakukan karena lebih mendekati realitas kehidupan terutama dalam menjelaskan perilaku sosial dan ekonomi. Namun, kekomplekan tersebut tidaklah seperti kerumitan dalam memahami ilmu matematika dan atau ilmu komputer. Bidang ilmu matematika dan

komputer selalu mempertimbangkan limitasi namun ekonomi kelembagaan mengabaikan limitasi tersebut.

Paradigma teori ekonomi baru merupakan jawaban dari paradigma lama yang memiliki beberapa kekurangan penting. Paradigma lama telah terbukti kurang mampu menyediakan penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. *Great Depression*. Pada tahun 1930-an, Teori Ekonomi Makro ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah depresi yang besar.
2. Definisi Modal. Modal seringkali didefinisikan secara sempit sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang sesuai untuk modal-modal dalam aktivitas ekonomi. Saat ini, modal yang seringkali terabaikan adalah modal sosial. Sementara modal sosial seringkali menjadi satu-satunya modal pembangunan yang dimiliki masyarakat khususnya di daerah terpencil dan miskin sumber daya alam. Di beberapa wilayah yang

telah berkembang, modal sosial ternyata mampu mempercepat terjadinya pembangunan dan menjaga hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, Modal dalam pembangunan meliputi modal yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan manusia dan modal yang berasal dari interaksi sosial.

3. Pengembangan sistem kerja yang efektif. Sistem kerja dalam aktivitas ekonomi harus menerapkan sistem kerja yang lebih holistik dengan menyerap sistem kerja alam dan interaksi alam dan sumber daya manusia.
4. Pemahaman nilai-nilai fundamental bagi manusia. Aktivitas ekonomi seringkali melupakan hak fundamental manusia di masa mendatang. Memaksimalkan kepuasan diartikan sebagai memaksimalkan kepuasan bagi manusia yang hidup di masa sekarang padahal nilai fundamental manusia adalah memelihara alam dan lingkungannya sehingga

terjadi pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, berkeadilan sosial namun tetap efisien secara ekonomi. Keberlanjutan ekologis diartikan sebagai suatu fungsi ekonomi yang kompatibel dengan sistem ekologis dan biofisik. Keadilan sosial mengandung makna bahwa fungsi ekonomi adalah memberi hak kehidupan bagi semua makhluk seperti hak menghirup udara bersih, hak memperoleh air bersih, hak untuk dilestarikan dan lain sebagainya. Efisien secara ekonomi berarti bahwa pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan mempertimbangkan biaya-biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan ekonomi. Hal ini akan dapat dicapai apabila diterapkan sistem pajak yang tepat.

5. Perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan sistem *check and balances* serta transparan. Paradigma ekonomi lama telah gagal mewujudkan sistem pemerintahan yang

baik. Sistem *check and balances* tidak berjalan dengan baik serta tidak transparan terutama dalam mengelola sumber daya alam yang menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Kegagalan paradigma lama tersebut mendorong munculnya paradigma baru yang disebut sebagai *Earth Economic* yaitu paradigma ekonomi yang lebih membumi dan sesuaid engan kehidupan nyata bahwa ekonomi harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang *complicated* sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja.

Pendalaman Materi

1. Jelaskan mengenai kompleksitas ilmu ekonomi bagi seorang perencana pembangunan!
2. Apakah yang dimaksud dengan paradigmm ekonomi kelembagaan?

BAB 4

Teori Biaya Transaksi

Ikhtisar

85

.MM.

Seperti diketahui, pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli bisa sangat asimetris. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan:

1. Mampu mendefinisikan mengenai biaya transaksi
2. Memahami mengenai ketidaksempurnaan pasar sehingga muncul biaya-biaya transaksi

3. Mampu mengupayakan agar biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen maupun produsen semakin rendah.
4. Memahami mengenai *necessary cost* dan *unnecessary cost* dalam proses transfer suatu barang dan jasa sehingga kesejahteraan produsen dan konsumen dapat ditingkatkan.

Spektrum teori ekonomi kelembagaan ini sangat luas, dan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan ekonomi yang sangat cepat. Salah satunya adalah Teori Biaya Transaksi. Teori Biaya Transaksi sudah diterima secara umum eksistensinya, namun di Indonesia nyaris belum pernah disentuh karena keterbatasan informasi maupun dominasi pemikiran aliran ekonomi klasik/neoklasik, baik pada level pengambil kebijakan maupun para intelektual (ekonom) yang bekerja di universitas dan lembaga studi/riset.

Seperti diketahui, pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli (consumers) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (producers) saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli bisa sangat asimetris. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.

Teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Berikutnya, teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh teori Coase (*Coase Theorem*) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan

cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna²⁸ atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi.²⁸ Dalam kasus monopoli, misalnya, inefisiensi bukan hanya terjadi akibat struktur pasar yang terkonsentrasi, namun juga oleh sebab kesulitan pihak monopolis menentukan jumlah pembeli dan harus menegosiasikan di antara mereka. Sedangkan pada kasus eksternalitas, inefisiensi terjadi jika biaya sosial produksi melebihi biaya privat produksi (eksternalitas negatif) sehingga perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi bagi tambahan biaya tersebut.

Sebenarnya untuk mendefinisikan biaya transaksi ini sangatlah pelik. Namun, sebagai upaya untuk mengerjakan investigasi konsep tentang biaya transaksi sangatlah berguna untuk mengenali bentuk dan struktur sebuah pertukaran/transaksi (Furubotn dan Richter, 1991:8). Menurut Williamson, transaksi terjadi bila barang dan jasa ditransfer melalui teknologi yang terpisah. Satu tahap aktivitas berhenti dan tahap yang

lain dimulai. Selanjutnya, Coase menunjukkan bahwa ‘jika pekerja pindah dari departemen (divisi) Y ke departemen (divisi) X, dia tidak pindah karena perubahan harga relatif, tetapi dia pindah karena diminta untuk melakukannya’. Akhirnya, Commons menyatakan bahwa ‘unit terakhir dari sebuah aktivitas harus mengandung ketiga prinsip, yaitu konflik (*conflict*), saling menguntungkan (*mutually*), dan ketertiban (*order*). Unit itu tidak lain adalah transaksi’.⁵ Sedangkan menurut Mburu, biaya transaksi adalah: (1) biaya pencarian dan informasi; (2) biaya negosiasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan (3) biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*). Secara lebih detail, proses negosiasi sendiri bisa sangat panjang dan memakan banyak biaya. Seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan lainnya. Serikat kerja dan pihak manajemen perusahaan, misalnya, setiap saat harus melakukan proses negosiasi baru secara periodik. Kemudian pengukuran juga dapat sangat mahal, karena

menyangkut keinginan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan.

Pembeli mobil, misalnya, ia bukan sekadar ingin tahu mengenai harga, melainkan juga informasi lain tentang kondisi mesin, keiritan bahan bakar, kenyamanan mobil, kelengkapan interior, dan lain sebagainya. Akibat kekurangan informasi inilah yang menimbulkan tambahan biaya transaksi. Terakhir, penegakan pertukaran juga memunculkan biaya transaksi. Jika dalam sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik, maka biaya transaksi berikutnya bisa ditekan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, dibutuhkan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa berlangsung, yang tentu saja ini menimbulkan biaya transaksi.

Furubotn dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (*market transaction costs*) dan biaya melakukan

hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (*managerial transaction costs*). Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (*political transaction costs*). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut dua tipe: (1) biaya transaksi ‘tetap’ (*fixed transaction costs*), yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*); dan (2) biaya transaksi ‘variabel’ (*variable transaction costs*), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Pada poin ini, sifat dari biaya transaksi sama dengan ongkos produksi, di mana keduanya mengenal konsep biaya tetap dan biaya variabel. Cuma, dalam identifikasi yang mendalam, tentu membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam biaya transaksi tidak semudah apabila membandingkannya dalam biaya produksi.

Secara spesifik, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*) bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai:

- Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai biaya untuk pencarian/*searching* dan informasi).
- Biaya untuk mengeksekusi kontrak/*concluding contracts* (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan).
- Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak (*enforcing the contractual obligations*).

Biaya transaksi manajerial meliputi: (1) biaya penyusunan (*setting up*), pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam *fixed transaction costs*; dan (2) biaya menjalankan organisasi, yang kemudian bisa dipilah dalam dua sub kategori: (a)

biaya informasi; dan (b) biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah (*across a separable interface*).

Terakhir, biaya transaksi politik (*political transaction costs*) berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan aspek politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif, dan bisa dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi: (1) biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal dan informal; (2) biaya untuk menjalankan politik (*the costs of running polity*). Biaya ini adalah pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan ‘tugas kekuasaan’ (*duties of sovereign*) (Furubotn dan Richter, 2000: 44-47).

Dari sudut pandang yang lain, biaya transaksi tersebut dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi

19

sebelum kontrak (*ex-ante*) dan setelah kontrak (*ex-post*). Biaya transaksi *ex-ante* adalah biaya membuat draf, negosiasi, dan mengamankan kesepakatan. Sedangkan biaya transaksi *ex-post* meliputi: (1) Biaya kegagalan adaptasi (*maladaptation*) ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan yang telah dipersyaratkan; (2) Biaya negosiasi/tawar-menawar (*haggling costs*) yang terjadi jika upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak (*ex-post*); (3) Biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan (tidak selalu pengadilan) apabila terjadi sengketa; dan (4) Biaya pengikatan agar komitmen yang telah dilakukan bisa dijamin.

Pendalaman Materi

1. Jelaskan mengenai biaya transaksi yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar!
2. Apakah sesungguhnya *necessary cost* dan *unnecessary cost*

BAB 5

Teori Hak Kepemilikan (Property Right)

Ikhtisar

Hak kemilikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya. Keberlangsungan suatu sumber daya akan sangat dipengaruhi oleh hak kepemilikan yang melekat pada sumber daya tersebut. Aliran Ekonomi Klasik memandang hak kepemilikan bukan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan aktivitas ekonomi sedangkan para ahli ekonomi kelembagaan meyakini sebaliknya.

Tujuan

1. Mahasiswa mampu mendefinisikan hak kepemilikan
2. Mahasiswa mampu menggambarkan karakteristik masing-masing hak kepemilikan

Pokok pemahaman mengenai hak kepemilikan³⁴ adalah Hak yang dimaknai sebagai aliran keuntungan yang dapat dinikmati terhadap sesuatu barang dan jasa yang juga mengandung kewajiban tersirat dalam hak tersebut.

Untuk memahami konsep dasar dari hak kepemilikan, langkah terbaik adalah dengan mula-mula⁹ mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik (*classical liberal state*).³ Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (*transferable*) melalui ijin menurut prinsip kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan (*right of ownership*) atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak

atas aset (to transfer all rights in the asset), atau beberapa hak (*some rights*) yang diinginkan.

Dengan deskripsi ini, hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (*exclusive right*), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (*unrestricted right*). Sedangkan Bromley dan Cernea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (*secure*) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Makna ini dengan cukup terang mendonorkan gambaran yang jelas, bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas aset yang dikuasai/dimiliki. Basis konsep ini pula yang nantinya dapat dipakai untuk memperluas cakupan dan pemahaman terhadap hak kepemilikan.

Perlu dimengerti pula, bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan (*system of rules*) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yakni perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan bisa didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan (*property*) di sini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (*intangible property*), seperti ide, puisi, dan formula/rumus kimia. Namun, barangkali di antara sekian banyak hak kepemilikan yang ada, bentuk hak kepemilikan yang paling penting bagi teori ekonomi adalah tenaga kerja dan alat-alat produksi (*means of production*). Faktanya memang demikian, di mana kebijakan-kebijakan hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin kepastian faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Faktor produksi tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatkan

kepastian hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan kegiatan produksi akan macet.

³⁸ Salah satu pemikir ekonomi kelembagaan yang mengupas hubungan antara konsep hak kepemilikan dan biaya transaksi adalah Yoram Barzel. Menurutnya, konsep ³⁸ hak kepemilikan sangat dekat dengan biaya transaksi, di mana biaya transaksi didefinisikan olehnya sebagai ongkos yang diasosiasikan dengan kegiatan transfer, menangkap, dan melindungi hak-hak (*transfer, capture, and protection of rights*). Jika biaya transaksi diasumsikan bahwa untuk aset apapun masing-masing biaya meningkat, dan bahwa baik proteksi maupun transfer penuh dari hak-hak tersebut dicegah agar tidak muncul biaya, maka kemudian biaya transaksi itu akan mengarahkan hak-hak yang dimiliki menjadi tidak lengkap (*complete*), karena orang-orang tidak akan pernah menemukan hak-haknya cukup berharga untuk mendapatkan potensi keuntungan dari aset-asetnya. Agar hak-hak terhadap aset yang dipunyai berlaku secara lengkap, baik pemilik maupun individu

lain yang tertarik terhadap aset tersebut harus memproses dengan pengetahuan penuh (*full knowledge*) terhadap seluruh atribut dari aset tersebut. Sebaliknya, ketiga hak-hak itu secara sempurna dirancang dengan baik, informasi produk harus menjadi tanpa biaya (*costless*) untuk memperoleh dan ongkos transaksi kemudian harus menjadi nol.

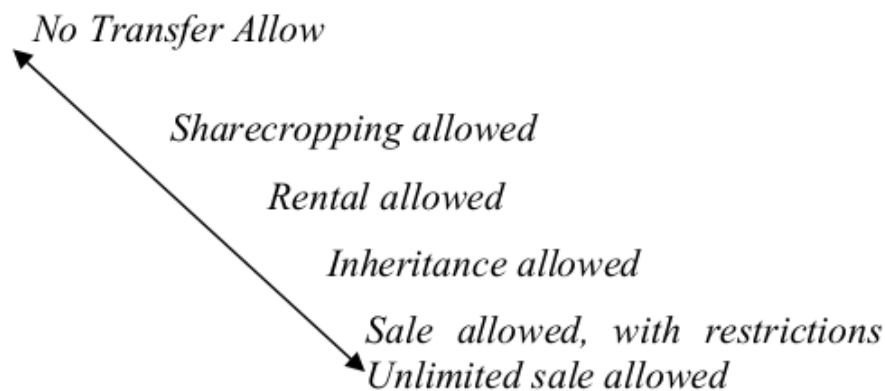
Dalam konteks kerangka kerja neoklasik, Tietenberg menerima premis yang dikembangkan oleh aliran neoklasik dan menyarankan bahwa struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumberdaya yang efisien pula. Kemudian dia mengidentifikasi empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting: 1. **Universality**: seluruh sumberdaya dimiliki secara privat dan seluruh jatah (entitlement) dispesifikasi secara lengkap. 2. **Eksklusivitas**: seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung

maupun tidak langsung, melalui penjualan atau yang lain. 3. **Transferability**: seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan/ditransfer dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela. 4. **Enforsibility**: hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

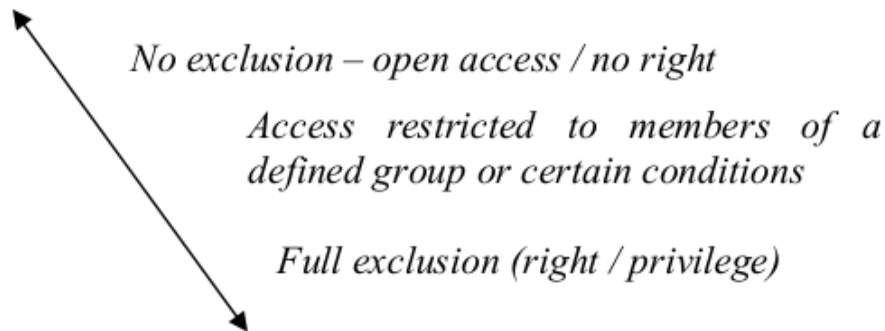
Pada akhirnya, bila dipilah-pilah jenis-jenis hak kepemilikan yang eksis dalam masyarakat, setidaknya terdapat tiga tipe yang penting, yakni hak kepemilikan individu (*private property right/ownership*), hak kepemilikan negara (*state property right/ownership*), dan hak kepemilikan komunal (*communal property right/ownership*). Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak untuk menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan, di mana dengan kepemilikan tersebut dia berhak untuk memperoleh keuntungan, entah dengan cara diolah, dijual, atau dengan jalan lain. Sedangkan hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik

hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya. Sementara itu, hak kepemilikan komunal tidak lain merupakan kepemilikan yang dipunyai oleh kelompok yang telah terdefinisikan dengan baik (*well-defined group*) dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan (*nontransferable asset*). Di luar itu, memang masih ada beberapa jenis hak kepemilikan lain, misalnya hak kepemilikan terbuka (*open access property right*), namun eksistensinya saat ini semakin melemah seiring dengan intensitas modernisasi ekonomi.

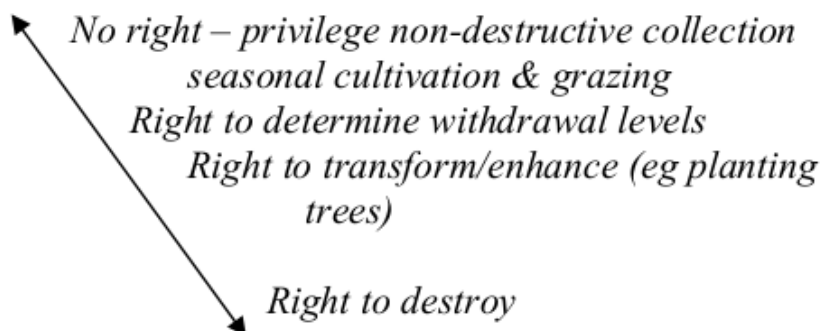
1. *Transferability*



2. Exclusion



3. Use and management rights



Pendalaman Materi

1. Jelaskan pentingnya menetapkan property right bagi suksesnya suatu perencanaan.
2. Apakah karakteristik penting yang membedakan kelompok property right tersebut.

BAB 6

Teori Modal Sosial

106

.,MM.

Ikhtisar

Perkembangan pemikiran ekonomi bermuara pada adanya kapital baru yang merupakan salah satu faktor dalam proses produksi maupun dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Kapital tersebut dinamai Modal Sosial yaitu modal yang terbangun dari jaringan kerja, norma dan rasa percaya yang tumbuh akibat adanya interaksi antar pelaku ekonomi. Pembahasan mengenai modal sosial sesungguhnya akan mampu menjelaskan mengenai kegagalan pasar yang seringkali terjadi.

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memahami munculnya modal baru yang dipertimbangkan sebagai salah satu faktor produksi
2. Mahasiswa mampu menganalisis peran modal sosial dalam proses perencanaan hingga evaluasi dari setiap perencanaan pembangunan.

Asal Muasal teori modal sosial pertama kali sesungguhnya dipicu oleh tulisan Pierre Bourdieu yang dipublikasikan pada akhir tahun 1970-an. Judul tulisan Bourdieu tersebut antara lain adalah *Le Capital Social: Notes Provisoires*, yang diterbitkan dalam *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* (1980). Namun, karena publikasi tersebut dilakukan dalam bahasa Perancis, membuat tidak banyak ilmuwan sosial (khususnya sosiologi dan ekonomi) yang menaruh perhatian. Setelah James S. Coleman mempublikasikan topik yang sama pada tahun 1993, barulah para intelektual mengunduh tema tersebut sebagai salah satu pemikiran penting yang mempertemukan antardisiplin ilmu. Akhirnya, hingga saat ini, banyak pihak yang berkeyakinan bahwa Coleman merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep modal sosial, seperti yang ia tulis dalam jurnal *American Journal of Sociology* yang berjudul *Social Capital in the Creation of Human Capital* (1988).

Lepas dari misinformasi tersebut, topik modal sosial memang sangat wajar mendapatkan atensi yang besar dari para pemikir sosial karena cakupan dan relevansinya yang kasat mata. Bahkan, Poldan menyebut modal sosial ‘sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial’ (*close to becoming a joint concept for all social sciences*). Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (*economic/financial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial baru eksis ketika berinteraksi dengan struktur sosial. Sifat ini jelas berbeda dengan dua modal sebelumnya, yakni modal ekonomi dan manusia. Dengan modal ekonomi yang dimiliki seseorang/perusahaan bisa melakukan kegiatan (ekonomi) tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian pula halnya dengan modal manusia. Hal inilah yang menyebabkan Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen: (i) modal

sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; dan (ii) modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) – baik individu maupun perusahaan – di dalam struktur tersebut (*within the structure*). Dari perspektif ini, sama halnya dengan modal lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.

Selanjutnya, Baker mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur sosial yang spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya; modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam hubungan antarpelakunya. Sedangkan Schiff mengartikan modal sosial sebagai seperangkat elemen dari struktur sosial yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan/atau manfaat (*utility*). Selain itu, Burt memaknai modal sosial sebagai teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapa pun yang

membuka peluang bagi pemanfaat modal ekonomi dan manusia.

Demikian pula dengan Uphoff yang menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (*intangible*) yang memengaruhi perilaku kerjasama. Sementara itu, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Seluruh definisi tersebut berujung dalam satu hal saja, bahwa modal sosial baru terasa bila telah terjadi interaksi dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial.

Melalui serangkaian pengertian tersebut, akhirnya terdapat sebuah aporisme terkenal yang menyatakan bahwa modal sosial bukanlah masalah apa yang anda ketahui, tetapi siapa yang anda kenal (*it's*

not what you know, it's who you know that matters).

41

Dengan dasar tersebut, modal sosial bisa merujuk kepada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif. Implikasinya, makna tersebut lebih memfokuskan kepada sumber (*sources*) daripada konsekuensi atas modal sosial, sementara pentingnya deskripsi tentang modal sosial, seperti kepercayaan dan hubungan timbal-balik, dikembangkan dalam sebuah proses yang terus-menerus. Di luar itu, definisi ini juga mengijinkan adanya penyatuan (*incorporation*) dimensi-dimensi yang berbeda dari modal sosial dan mengakui bahwa komunitas bisa memiliki akses yang lebih luas atau kecil. Terakhir, meskipun definisi ini melihat komunitas sebagai unit analisis utama (ketimbang individu, rumah tangga, atau negara), namun tetap mengakui bahwa individu dan rumah tangga (sebagai anggota dari komunitas) merupakan pelaku dari modal sosial dan komunitas sendiri dibentuk sebagai bagian dari relasinya dengan negara. Realitas ini menguatkan proposisi yang sudah diterangkan di muka, bahwa

jaringan dan norma merupakan unsur penting dalam formulasi modal sosial sehingga eksistensinya sangat dibutuhkan.

¹⁸ Coleman menyebut setidaknya terdapat tiga ⁸ bentuk dari modal sosial. Pertama, struktur kewajiban (*obligations*), ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (*obligation held*). Berdasarkan perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih ⁸ baik daripada situasi sebaliknya. Kedua, jaringan informasi (*information channels*). Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal, tidak gratis. Pada level yang paling minimum, di mana ini perlu mendapatkan perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu saja, ¹⁸ individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi;

demikian pula sebaliknya. Ketiga, norma dan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (*achievement*) tentu saja bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Contoh lainnya, norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas yang bisa memengaruhi orang-orang muda, mempunyai potensi untuk mendidik generasi muda tersebut memanfaatkan waktu sebaik-baiknya (*having a good time*).

Dalam dua dekade terakhir, terjadi banyak perkembangan dalam ilmu sosial yang memberikan isyarat pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi yang dikenal dengan *New Institution Economics* (NIE). Hal utama yang melatarbelakangi berkembangnya NIE adalah munculnya masalah yang berkaitan dengan *collective action*, *transaction cost*, keterbatasan rasionalitas dalam perilaku manusia, masalah koordinasi, perubahan teknologi dan perilaku *rent-seeking*. Menurut Nabli dan Nugent (1989)

pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi telah dipahami sejak Adam Smith's: *Wealth of Nation*, hingga ekonomi pembangunan modern baik yang kualitatif seperti Myrdal (1968), semi kuantitatif (Morawetz, 1981) maupun yang sangat kuantitatif (Adelman dan Morris (1967, 1986)). Namun demikian, struktur teori yang relevan mengenai kelembagaan dan pembangunan ekonomi tidak disertai dengan sistematika penerapan yang sistematis dalam pembangunan ekonomi selama ini.

Dalam NIE, asumsi neo-klasik yang tidak realistik seperti informasi yang sempurna, ketiadaan biaya transaksi dan rasionalitas yang tidak terbatas menjadi lebih longgar. Namun memasukkan perubahan kelembagaan secara eksogen dan endogen ke dalam model pertumbuhan yang optimum masih merupakan tantangan dalam literatur pembangunan (Tornel, 1997). Akar perdebatan akhir-akhir ini adalah isu pembangunan kelembagaan (*institutional development*) yang terkait dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mampu menekan biaya transaksi

melalui penguatan rasa saling percaya, jaringan kerja dan norma sebagai determinan modal sosial. Selain itu, modal sosial juga sangat berperan dalam menghindari risiko kegagalan komitmen akibat adanya perilaku yang oportunistik.

Arrow (1974) mengemukakan bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai manfaat dari *collective action* pada saat terjadinya kegagalan sistem harga. Oleh karena itu dapat dikatakan jaringan kerja (*network*) dan pasar bersifat substitusi. Namun di sisi lain, dikatakan pula bahwa jaringan kerja dan pasar bersifat komplement. Jaringan kerja produksi dan pertukaran dari suatu komoditi sangat penting bagi berfungsinya sistem pasar. Jaringan kerja dapat menjadi alat melalui mana pasar dapat dibangun (perdagangan jarak jauh di masa lalu).

Saat ini mulai diakui bahwa jenis modal tradisional (sumber daya alam, manusia dan fisik) hanya menentukan secara parsial dari keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu lainnya, yang selama ini relatif terabaikan adalah cara aktor

ekonomi saling berhubungan dan mengorganisir diri mereka untuk menghasilkan pengembangan dan pertumbuhan. Pengabaian ini digambarkan sebagai hilangnya salah satu mata rantai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu modal sosial (Grootaert, 1998). Sesungguhnya perdebatan mengenai modal sosial telah berlangsung sejak tahun 1920-an namun mulai memperoleh perhatian kembali ketika Putnam mempublikasikan buku berjudul *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* (1993) serta *America's Declining Social Capital* (1995).

Penelitian mengenai peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial dan politik wilayah maupun penelitian dalam pengembangan konsep dan pengukuran modal sosial telah banyak dilakukan. Masing-masing peneliti memberikan penekanan yang berbeda terhadap aspek dan determinan modal sosial. Namun konsep modal sosial dan perannya di Indonesia belum memperoleh perhatian yang memadai sehingga kuantitas penelitian yang membahas peran modal sosial

baik dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga maupun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah masih sangat terbatas.

Ahli ekonomi, sosiologi dan politik mendefinisikan modal sosial secara berbeda beda. Pengelompokkan sumber modal sosial disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam pengukuran modal sosial tersebut dan secara garis besar dibedakan atas tiga kelompok utama yaitu (1) Rasa percaya, (2) Norma dan (3) Jaringan Kerja. Selain itu, beberapa peneliti lain memberikan penekanan sumber modal sosial pada *belief* (kepercayaan) dan *institutional* (kelembagaan).

² **Rasa Percaya (*Trust*)**

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan lainnya.

Membangun rasa percaya adalah bagian dari proses kasih sayang yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga. Sepanjang adanya rasa percaya dalam perilaku dan hubungan kekeluargaan maka akan terbangun prinsip-prinsip resiprositas dan pertukaran. Sebagai alat untuk membangun hubungan, rasa percaya dapat menekan biaya transaksi yaitu biaya yang muncul dalam proses pertukaran yang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu kontak, kontrak dan kontrol. Semua orang lebih menyukai hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya dibandingkan dengan hubungan yang oportunistik. Percaya berarti siap menerima risiko dan ketidakpastian. Rasa tidak percaya akan meningkatkan biaya transaksi. Casson dan Godley (2000) mendefinisikan rasa percaya sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar.

Rasa percaya akan memudahkan terjalinnya kerjasama. Semakin tebal rasa percaya pada orang lain semakin kuat kerja sama yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kepercayaan sosial

muncul dari hubungan yang bersumber pada norma resiprositas dan jaringan kerja dari keterkaitan warganegara. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak dibutuhkan aktivitas monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku seperti yang diinginkan. Rasa saling percaya dapat dibangun namun dapat pula hancur.

Rasa percaya ditentukan oleh *homogeneity*, komposisi populasi dan tingkat ketidaksamaan (*inequality*). Rasa percaya yang tinggi ditemukan pada wilayah dengan ras dan komposisi populasi yang homogen serta tingkat *inequality* yang rendah. Sumber kepercayaan dibedakan atas sumber makro dan mikro dimana sumber makro mencakup ketuhanan, etika dan hukum sedangkan sumber mikro berhubungan dengan penyusunan kelembagaan. Williamson (1988) dalam Casson dan Godley (2000) menyatakan bahwa kepercayaan tidak dapat ditumbuhkan oleh salah satu sumber saja. Seringkali rasa saling percaya tumbuh berdasarkan pada hubungan teman dan keluarga.

Rao (2001) menyatakan bahwa rasa saling percaya (*mutual trust*) penting bagi pembangunan ekonomi pasar yang sehat. Rasa percaya mengurangi kebutuhan akan penegakan kontrak dan dapat menghilangkan biaya monitoring. Rasa percaya yang terus-menerus tidak dapat dibangun tanpa menunjukkan kebenaran. Sifat rasional manusia yang terbatas (*bounded rationality*) berpengaruh pada usaha membangun rasa saling percaya. Oleh karena itu, batas rasionalitas manusia harus diperluas melalui komunikasi dan ketersediaan informasi yang dapat dipercaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya berhubungan secara nyata dan positif dengan pertumbuhan ekonomi demikian pula sebaliknya, keberhasilan pemerintah mewujudkan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih baik dapat memperkuat rasa percaya sosial masyarakat..

Norma (*Share Value*)

Dalam *traditional theory of group* dinyatakan bahwa organisasi dan kelompok memiliki sifat *ubiquitous* dan sifat ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk bergabung dan membentuk asosiasi. Mosca dalam Olson (1977) menyatakan bahwa manusia memiliki instink untuk berkumpul bersama (*herding together*) dan bersaing dengan kumpulan lainnya (*fighting with other herds*). Instink ini meningkat dalam suatu masyarakat tertentu dengan alasan moral.

Selama ini, terbentuk anggapan bahwa kelompok individu dengan kepentingan bersama (*common interest*), paling tidak mencakup tujuan ekonomi, umumnya akan berusaha mengembangkan tujuan bersama tersebut. Kelompok individu diharapkan lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu. Anggapan tersebut mengasumsikan bahwa individu dalam kelompok akan bertindak di luar keinginan pribadinya.

21
Tetapi sesungguhnya, individu dalam kelompok akan berusaha untuk mencapai tujuan bersama hanya jika individu tersebut juga memperoleh keuntungan dengan kata lain, tindakan untuk mencapai tujuan bersama tersebut bukanlah sukarela. Oleh karena itu, diperlukan norma yang berperan mengatur individu dalam suatu kelompok sehingga keuntungan setiap anggota proporsional dengan usahanya dalam kelompok tersebut.

2
Norma adalah nilai bersama yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Fukuyama (1999) menyatakan modal sosial sebagai norma informal yang bersifat instan yang dapat mengembangkan kerjasama antar dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial dapat disusun dari norma resiprositas antar teman. Melalui 33
definisi tersebut, selanjutnya dikatakan bahwa rasa percaya, norma dan *civil society* serta semua yang berkaitan dengan modal sosial muncul sebagai hasil dari modal sosial tetapi bukan merupakan modal sosial itu sendiri.

Menurut Plateau (2000) perkembangan dalam pengertian pembangunan ekonomi telah terjadi dimana saat ini tujuan dan nilai-nilai sosial memperoleh ruang yang lebih luas.² Norma sosial yang didefinisikan sebagai aturan yang menentukan perilaku bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri.

Jaringan Kerja (*Network*)

Dasgupta (2002) mengasumsikan bahwa setiap orang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih.²¹ Tetapi sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan pilihan dengan siapa berinteraksi dan dengan alasan tertentu. Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (*system of communication channel*)³¹ untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal. Membangun saluran komunikasi ini membutuhkan biaya yang

dikenal dengan biaya transaksi. Keinginan untuk bergabung dengan orang lain, sebagian disebabkan oleh adanya nilai-nilai bersama. Jaringan kerja juga berperan dalam membangun koalisi dan koordinasi. Secara umum dikatakan bahwa keputusan melakukan investasi dalam saluran tertentu disebabkan oleh adanya kontribusi saluran tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi individu.

Jaringan kerja menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan horisontal antar manusia dan hubungan inter dan intra asosiasi tersebut. Granovetter (1973) menyatakan bahwa ikatan inter masyarakat (*strong ties*) diperlukan untuk memberikan identitas pada keluarga dan masyarakat serta tujuan bersama. Pandangan ini juga menganggap bahwa tanpa ikatan antar masyarakat (*weak ties*) yang menghubungkan berbagai asosiasi sosial, maka ikatan horisontal yang kuat akan menjadi dasar untuk mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas.

Modal sosial juga dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana individu-individu dapat

menggunakan keanggotaannya dalam suatu kelompok untuk memperoleh manfaat. Modal sosial tidak dapat dievaluasi tanpa pengetahuan mengenai dimana individu tersebut berada karena interaksi sosial tergantung dari struktur jaringan kerja dan struktur masyarakatnya. Coleman (1988) mengatakan densitas dari jaringan kerja sosial akan meningkatkan efisiensi penguatan perilaku kerjasama dalam suatu organisasi. Modal sosial memberi manfaat bagi individu dan jaringan kerja individu itu sendiri. Menurutnya, modal sosial adalah jumlah dari "*relational capital*" yang dimiliki beberapa individu yang dibangun oleh norma resiprositas. Modal sosial memiliki eksternalitas ekonomi positif pada tingkat lokal melalui proses fasilitasi terhadap aksi bersama (*collective action*). Modal sosial dibentuk berdasarkan hubungan sosial dan struktur sosial dimana *network closure* memiliki peran penting. Menurut Coleman, sifat hubungan sosial tergantung dari *closure* struktur sosial dimana *Closure* tersebut tidak hanya penting untuk membangun norma yang efektif tetapi juga membangun kepercayaan.

Portes seperti dinyatakan oleh Woolcock (1998) mengakui peran penting dari hubungan tingkat komunitas (*community level relationship*) untuk mengakses sumber daya lokal. Pada tingkat lokal, akuntabilitas individu dan *network of trust* sangat membantu menyelesaikan masalah akses terhadap modal finansial. Pada tingkat regional, organisasi yang kuat akan membangun jaringan kerja yang baik antar masyarakat sipil dan pemerintah. Jaringan kerja organisasi yang kuat juga dapat membangun keterkaitan organisasi tersebut dengan pelaku pasar lainnya sehingga mampu membuka peluang pasar yang lebih baik (Bebbington 1999).

Jaringan kerja sosial membuat individu memiliki akses kepada informasi yang berpotensi untuk membantu mereka. Penelitian yang dilakukan Putnam (1995) menekankan pada bentuk modal sosial yang berhubungan dengan *civic engagement* yaitu hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakatnya terutama jaringan kerja formal (*neighbourhood association* atau *sport club*). Literatur umum

mengenai jaringan kerja sosial menyatakan bahwa semakin banyak jaringan kerja sosial akan menjadi pertimbangan dalam analisis organisasi sosial (Ferlander dan Timms 2001).

Putnam (1993) mengamati perbedaan kritis antara jaringan kerja horisontal dan vertikal. Dinyatakan bahwa jaringan kerja vertikal, tidak dapat menopang rasa percaya sosial (*social trust*) dan kerjasama. Aliran vertikal dari informasi seringkali kurang dapat dipercaya dibandingkan aliran horisontal. Selanjutnya Putnam menjelaskan bahwa *social trust* dalam kondisi modern dapat ditingkatkan melalui norma resiprositas dan jaringan kerja dari ikatan masyarakat (*network of civic engegement*).

Pendalaman Materi

1. Kapanakah modal sosial diyakini menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan?
2. Bagaimanakan *trust*, *norm* dan *networking* berpengaruh terhadap keberhasilan proyek proyek pembangunan?

BAB 7

Game Theory

Ikhtisar

129

.,MM.

Di setiap interaksi yang terbangun antara manusia maupun dalam diri manusia secara individu selalu terjadi game yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan masalah yang terbaik. Dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun dalam bisnis, pemahaman teori permainan menjadi hal yang penting. Teori permainan (*Game Theory*) merupakan teori yang relatif baru berkembang setelah ilmuwan Perancis Emile Borel memberikan perhatian yang besar terhadap interaksi berbagai pihak.

Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami teori permainan
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori permainan dalam kehidupan sehari-hari dalam aktivitas yang berorientasi *profit* maupun non-profit.

Memahami *Game Theory* harus didahului dengan memahami asumsi yang mendasarinya yaitu:

1. Setiap pemain bermain rasional, dengan asumsi memiliki intelegensi yang sama, dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan *payoff*, dengan kriteria maksimin dan minimaks.
2. Terdiri dari 2 pemain, keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain.
3. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris, dan kerugian pemain kolom.
4. Permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai nol (0), tidak ada yang menang/kalah.
5. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal

Mari diperhatikan tabel berikut:

		Strategi Perusahaan B		
		Harga Murah	Harga Sedang	Harga Mahal
Strategi Perusahaan A	Harga Murah	2	8	3
	Harga Mahal	9	6	5

Dari ¹ contoh tabel matrik *pay off* (matrik permainan) di atas, dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni :

- ¹ Nilai-nilai yang ada dalam tabel tersebut (yakni angka 2, 8, 3 di baris pertama dan 9, 6, 5 di baris kedua), merupakan contoh nilai yang diperoleh apabila perusahaan A atau B penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Satuan nilai tersebut merupakan efektifitas yang dapat berupa uang, persentase pangsa pasar, jumlah pelanggan dan sejenisnya. Nilai positif menunjukkan keuntungan bagi pemain

baris dan kerugian bagi pemain kolom, begitu pula sebaliknya nilai negatif menunjukkan kerugian bagi pemain baris dan keuntungan bagi pemain kolom. Sebagai contoh nilai 8 pada sel **C12** menunjukkan¹ apabila pemain/perusahaan A menggunakan strategi harga murah (S1) dan perusahaan B meresponnya dengan strategi harga sedang (S2), maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 8 yang berarti perusahaan B akan mengalami kerugian sebesar 8.

2. Suatu strategi dari sebuah pemain/perusahaan dianggap tidak dapat dirusak oleh perusahaan lainnya.
3. Setiap pemain/perusahaan akan memilih strategi-strategi tersebut secara terus menerus selama perusahaan masih memiliki keinginan melanjutkan usahanya.

4. Suatu permainan/persaingan dikatakan adil atau '*fair*' apabila hasil akhir permainan atau persaingan menghasilkan nilai nol (0), atau tidak ada pemain atau perusahaan yang menang/kalah atau mendapat keuntungan/kerugian.
5. Suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai *pay off* yang lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya, bagi pemain/perusahaan baris, nilai positif (keuntungan) yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan, menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Bagi pemain kolom, nilai negatif (kerugian) yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan, menghasilkan nilai negatif yang lebih kecil dari hasil penggunaan strategi lainnya.
6. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap perusahaan.

Penyelesaian masalah dalam Teori Permainan ini, biasanya menggunakan dua karakteristik strategi, yakni:

a. Strategi Murni

1 Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep *maximin* untuk pemain/perusahaan baris dan konsep *minimax* untuk pemain/perusahaan kolom. Dalam strategi ini seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi/strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal (saddle point yang sama).

b. Strategi Campuran

Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing

pemain/perusahaan. Dalam strategi ini seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran/lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal.

Agar sebuah permainan atau persaingan menjadi optimal, setiap strategi yang dipergunakan berusaha untuk mendapatkan nilai permainan (*saddle point*) yang sama.

Untuk memahami dengan lebih jelas mengenai penggunaan Teori permainan ini, perhatikan dua contoh kasus berikut ini :

Contoh kasus 1 (Strategi Murni)

Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama, selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan

2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi, dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini :

		Strategi Perusahaan B		
		Harga Murah	Harga Sedang	Harga Mahal
Strategi Perusahaan A	Harga Murah	2	8	3
	Harga Mahal	9	6	5

Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan, agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal (kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan kalau harus rugi maka kerugian tersebut adalah paling kecil).

Jawab :

Seperti telah dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan aturan *maximin* dan pemain kolom akan menggunakan aturan *minimax*.

Langkah 1

Untuk pemain baris (perusahaan A), pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris

(Baris satu nilai terkecilnya 1 dan baris dua nilai terkecilnya 4). Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4.

Strategi Perusahaan B			Maximi
Harga	Harga	Harg	

		Murah	Sedan	Mahal	
Strategi Perusahaan A	Harga Murah	2	8	3	2
	Harga Mahal	9	6	5	5
	Minimax	→	9	8	5

Langkah 2

Untuk pemain kolom, (perusahaan B), pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom (kolom satu nilai terbesarnya 9, kolom dua nilai terbesarnya 8, dan kolom tiga nilai terbesarnya 5). Selanjutnya dari tiga nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai **5** (rugi yang paling kecil).

Langkah 3

Karena pilihan pemain baris-A dan pemain kolom-B sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai **5**, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal atau

sudah ditemukan nilai permainan (saddle point) yang sama.

Hasil optimal di atas, dimana masing-masing pemain memilih nilai 5 mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 5, bila ia menggunakan strategi harga mahal (S2). Sedangkan pemain B, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 5, dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal (S3). Penggunaan strategi selain yang direkomendasikan di atas akan berdampak pada menurunnya keuntungan bagi A dan meningkatnya kerugian bagi B, atau tidak dapat selesainya persaingan atau permainan yang ada.

Contoh kasus 2 (Strategi Campuran)

Dari kasus di atas, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A, yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini :

		Strategi Perusahaan B		
		Harga Murah	Harga Sedang	Harga Mahal
Strategi Perusahaan A	Harga Murah	1	6	8
	Harga sedang	-3	1	5
	Harga Mahal	7	3	10

Jawab :
Langkah 1

Mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni. Seperti telah dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan aturan *maximin* dan pemain kolom akan menggunakan aturan *minimax*. Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris (Baris satu nilai terkecilnya 2, untuk baris kedua nilai terkecilnya -1 dan baris tiga nilai terkecilnya 1). Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 2.

		Strategi Perusahaan B			Maximin
		Harga Murah	Harga Sedang	Harga Mahal	
Strategi Perusahaan A	Harga Murah	1	6	8	1
	Harga sedang	-3	1	5	-3
	Harga Mahal	7	3	10	3
Minimax		7	6	10	

Langkah 2

4

Untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom (kolom satu nilai terbesarnya 7, kolom dua nilai terbesarnya 6, dan kolom tiga nilai terbesarnya 10). Selanjutnya dari tiga nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 6 (rugi yang paling kecil).

Langkah 3

Dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris-A dan pemain kolom-B tidak sama, dimana pemain atau perusahaan A memilih nilai 3 dan perusahaan B memilih nilai 5, dengan demikian maka permainan ini dapat dikatakan belum optimal karena belum ditemukan nilai permainan (sadle point) yang sama. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran, yang langkahnya adalah sebagai berikut :

Langkah 4

4

Masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling

buruk. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah paling buruk, karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A (ada nilai negatif / -1 nya). Dan bagi pemain B, strategi S3 adalah paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar (perhatikan nilai-nilai kerugian di strategi S3 pemain/perusahaan B)

Langkah 5

Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut :

Strategi Perusahaan B		Maximin
Harga Murah	Harga Sedang	

Strategi Perusahaan A	Harga Murah	1	6	1
	Harga Mahal	7	3	3
	Minimax	7	6	

sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi, perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2.

Langkah 6

Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar p , maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah $(1-p)$. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1

adalah sebesar q , maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah $(1-q)$.

Langkah 7

Selanjutnya mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung *saddle point* yang optimal, dengan cara sebagai berikut :

Untuk perusahaan A

Bila, apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S1, maka :

$$1p + 7(1-p) = 1p + 7 - 7p = 7 - 6p$$

Bila, apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2, maka :

$$6p + 3(1-p) = 6p + 3 - 3p = 3 + 3p$$

Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka :

$$7 - 6p = 3 + 3p$$

$$4 = 9p$$

$$P = 4/9 = 0,44$$

Dan apabila nilai $p = 0,44$, maka nilai ¹ $(1-p)$ adalah $(1 - 0,44) = 0,56$, sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah:

Dengan persamaan ke-1 Dengan persamaan ke-2

$$= 1p + 7(1-p) = 6p + 3(1-p)$$

$$= 1(0,44) + 7(0,56) = 6(0,44) + 3(0,56)$$

$$= 4.3 = 4.3$$

Perhatikan, bahwa keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 4.3. Coba diingat di atas, bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini keuntungan perusahaan A hanya sebesar

3, berarti dengan digunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat 1,3 menjadi 4,3.

Bagaimana dengan perusahaan B ?

Untuk perusahaan B

Bila, apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1, maka :

$$1q + 6(1-q) = 1q + 6 - 6q = \mathbf{6 - 5q}$$

Bila, apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3, maka :

$$7q + 3(1-q) = 7q + 3 - 3q = \mathbf{3 + 4q}$$

Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka :

$$6 - 5q = 3 + 4q$$

$$3 = 9q$$

$$q = 3/9 = 0,33$$

Dan apabila nilai $q = 0,33$, maka nilai ¹ $(1-q)$ adalah $(1 - 0,33) = 0,67$, sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B adalah :

Dengan persamaan ke-1 Dengan persamaan ke-2

$$\begin{aligned} &= 1q + 6(1-q) = 7q + 3(1-q) \\ &= 1(0,33) + 6(0,67) = 7(0,33) + 3(0,67) \\ &= 4,3 = 4.3 \end{aligned}$$

Perhatikan, bahwa keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 4.3. Coba diingat di atas, bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini kerugian minimal perusahaan **B** adalah sebesar 6, berarti dengan digunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B bisa menurun sebesar 1,7 menjadi 4.3.

Kesimpulan :

Karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan (saddle point) yang sama, mana penyelesaian masalah permainan/persaingan di atas dilanjutkan dengan digunakannya strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti disamping mampu menemukan nilai permainan (saddle point) yang sama, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 4.3 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 4.3 atau **Sudah optimal**.

Pendalaman Materi

- 1.

BAB 8

Aplikasi Ilmu Ekonomi Kelembagaan

Ikhtisar

Bab ini secara singkat menunjukkan 3 aplikasi pendekatan ekonomi kelembagaan (dengan memakai teori ekonomi biaya transaksi, teori hak kepemilikan, dan teori modal sosial) dalam isu-isu ekonomi. Seringkali pemecahan masalah di bidang ekonomi hanya dilakukan secara pasial sehingga tidak mampu memberikan jalan keluar yang mengatasi akar permasalahannya.

Tujuan

1. mahasiswa memperoleh gambaran permasalahan nyata di lapangan yang diselesaikan dengan menerapkan pendekatan ekonomi kelembagaan
2. mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi kelembagaan secara holistik

Kasus konflik PILKADA

Di era desentralisasi saat ini, pemilihan kepala daerah menjadi isu yang sangat menarik karena pemilihan kepala daerah ini tidak hanya menghabiskan biaya mahal namun juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan di beberapa tempat. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya fisik namun juga kerugian sosial (melemahnya rasa saling percaya dan jejaring kerja serta norma norma adat dan budaya yang telah terbangun mengakar di masyarakat).

Pada era perjuangan kemerdekaan, rasa saling percaya merupakan modal utama yang mempersatukan nusantara. Kekuatan perasaaan seperjuangan merupakan salah satu bukti kuat terbangunnya rasa percaya dalam masyarakat Indonesia.

Lemahnya bangunan rasa percaya ditunjukkan oleh mudahnya penjajah memecah belah bangsa

Indonesia dengan cara mengadu domba. Indonesia yang terdiri dari kepulauan dimana belum berkembang sistem komunikasi maka keterbatasan jarak akan memudahkan bangsa lain untuk memecah belah.

Hasil kajian dan pengamatan menunjukkan bahwa konflik pemilihan kepala daerah disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap proses pemilihan tersebut. Ditinjau dari ekonomi kelembagaan, konflik yang timbul dalam proses pemilihan kepala daerah disebabkan oleh lemahnya modal sosial yaitu hilangnya kepercayaan kelompok masyarakat yang kalah terhadap kelompok pemenang. Ketiadaan kepercayaan tersebut tentu timbul karena beberapa hal seperti:

1. kelompok pemenang tidak membangun jejaring yang didasarkan oleh sikap pengabdian melainkan oleh iming iming finansial maupun jabatan.

2. Kelompok yang kalah tidak patuh terhadap norma dan tidak memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara negara.

Dua penjelasan sederhana tersebut menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah yang menimbulkan konflik disebabkan oleh melemahnya rasa saling percaya, norma dan jejaring sosial dalam masyarakat Indonesia.

Pemilihan kepala daerah yang tidak menimbulkan konflik menunjukkan bahwa kelompok pemenang memang mampu menunjukkan bahwa kepala daerah terpilih memiliki ketulusan hati, kejujuran dan komitmen yang kuat untuk memajukan masyarakat. Faktor faktor tersebut akan menyebabkan biaya transaksi dalam proses pemilihan kepala daerah semakin tinggi.

Kasus Industri Gula di Indonesia

Kasus industri gula di Indonesia selama ini selalu ditinjau dari sisi produksi sebagai penyebab inefisiensi, entah karena benih dan pupuk yang mahal, lahan sewa makin mahal, atau mesin pabrik gula yang kuno. Tapi beberapa riset menunjukkan fakta lain, bahwa sebagian sumber inefisiensi industri gula berasal dari sisi biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi di pabrik gula (PG) berasal dari manajemen yang lemah sehingga, baik secara internal maupun eksternal. Biaya transaksi yang muncul akibat menggunakan “pasar” (*market transaction costs*), muncul karena PG harus menanggung biaya membuat kontrak dengan petani/pihak lain, bantuan kepada APTR/KUD, proses lelang gula, dan lain-lain. Kemudian biaya transaksi yang berkaitan dengan model manajemen perusahaan (*managerial transaction costs*), PG dibebani ongkos

yang muncul akibat hirarkhi pengambilan keputusan yang berjenjang. Pada kasus PG milik pemerintah, manajemen PG hanya memiliki otoritas terbatas untuk mengambil keputusan, misalnya, dalam pembelian mesin atau rencana investasi. Seluruh proses itu harus melewati pihak PTPN (PT Perkebunan Negara), yang tentu saja dapat mengganggu proses produksi. Akhirnya, PG juga terbebani dengan biaya yang muncul karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah (political transaction costs), misalnya pajak, polusi, keamanan, dan pungutan ilegal.

Demikian pula yang terjadi pada level petani tebu, terdapat ragam biaya transaksi yang harus ditanggung petani. Saat ini sekurangnya terdapat dua model kelembagaan yang bisa dipilih petani tebu, yakni petani tebu rakyat kredit (TRK) dan petani tebu rakyat mandiri (TRM). TRK adalah petani yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah, yang untuk mendapatkannya harus berhubungan dengan pabrik gula, APTR, dan koperasi. Sedangkan TRM adalah

petani bebas yang tidak terikat skema kredit dari pemerintah. Masing-masing kelembagaan ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. TRK memiliki kelebihan menjamin kepastian usaha petani dan sistem bagi hasil, namun kelemahannya sering kali pihak KUD tidak menulis secara detail potongan yang dikenakan sehingga rawan manipulasi. Sedangkan TRM kelebihanannya tidak banyak pungutan yang dikenakan, tapi keterbatasannya beberapa bagian yang menjadi hak petani (misalnya tetes) tidak bisa diterima. Akhirnya, secara umum biaya transaksi yang ditanggung oleh petani tebu adalah: pajak, tebang-muat-angkut, donasi dan fee kepada koperasi, sumbangan kepada kelompok petani, fee untuk perantara (khusus TRM), membuat kontrak, perayaan/selamatan, selisih bunga (interest margin) dari yang resmi ditetapkan pemerintah (khusus TRK), biaya oportunitas, keterlambatan penyaluran kredit, dan lain-lain.

Secara lebih spesifik, dapat dinyatakan sebagai berikut: (i) biaya transaksi petani tebu (baik TRK maupun TRM) menyumbangkan sekitar 42% dari total biaya, dan sisanya (58%) berupa biaya produksi. Jika variabel biaya sewa lahan dikeluarkan dari biaya produksi (karena pada umumnya petani tebu sebagian lahannya adalah menyewa), konfigurasi biaya menjadi berubah. Proporsi biaya transaksi meningkat menjadi sekitar 50% dari total biaya dan separuhnya lagi berupa biaya produksi. Jika dirinci lebih detail, 30-35% dari biaya produksi adalah sewa lahan sehingga bila ingin mengurangi biaya produksi, maka masalah kepemilikan lahan menjadi isu yang harus ditangani oleh pemerintah. Sementara untuk biaya transaksi, di samping variabel-variabel yang sudah diungkapkan di atas, masih harus ditambah dengan dugaan manipulasi rendemen, selisih bunga kredit, proses tebang angkut yang belum efisien, dan waktu giling yang belum tertangani dengan baik; dan (ii) proporsi biaya transaksi PG juga mencapai sekitar 50% dari total biaya. Biaya transaksi terbesar disumbangkan dari

model manajemen perusahaan (proses pengambilan keputusan, penataan sumberdaya manusia, dan penyusunan kontrak dengan pihak lain). Dengan begitu, biaya transaksi yang muncul di PG lebih banyak disebabkan oleh aspek managerial transaction costs. Sederhananya, biaya transaksi tersebut lebih berkenaan dengan model hubungan antara PG dengan pihak PTPN (bila dimiliki oleh pemerintah) yang cenderung sentralistik sehingga bisa mengganggu proses produksi.

Aplikasi Teori Hak Kepemilikan

Kedua, aplikasi teori hak kepemilikan. Terdapat dua hal yang bisa diungkapkan: (i) melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru (seperti teknologi). Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan/inovasi teknologi (lewat paten) akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Logikanya sederhana, jaminan terhadap hak paten akan memberi insentif material bagi pelaku ekonomi (maupun para ahli) untuk terus menemukan inovasi baru. Bila inovasi (teknologi) tercipta, maka secara langsung akan memengaruhi pola produksi yang bisa meningkatkan produktivitas; dan (ii) melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Seperti dimaklumi, sampai hari ini ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap sumberdaya alam (SDA) masih sangat besar, khususnya di negara berkembang. Ketergantungan terhadap SDA menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk melakukan eksploitasi sebesar-sebesarnya sehingga berpotensi merusak lingkungan (environmental degradation). Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap SDA cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan (efisiensi) ekonomi.

Sekadar ilustrasi, untuk melihat relasi antara hak kepemilikan dan inovasi teknologi, peristiwa yang

sering terjadi di negara berkembang adalah banyak investor (khususnya asing) yang hengkang karena tidak ada jaminan terhadap setiap hak kepemilikan yang diproduksi, baik dalam bentuk produk maupun hak paten. Setiap muncul komoditas industri yang baru (misalnya elektronik, software, kaset, dan lain-lain) selalu diiringi dengan munculnya produk-produk bajakan yang membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya, produsen tidak memiliki insentif untuk menciptakan produk baru sehingga membuat kegiatan ekonomi lesu. Bahkan, dalam kasus yang ekstrem, produsen tersebut pindah ke negara lain yang lebih memiliki kepastian hukum, sehingga membuat negara yang ditinggalkan investasinya menjadi macet. Cerita akhirnya mudah ditebak, negara tersebut menjadi tidak dapat mempercepat kegiatan ekonomi sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Lebih naas lagi, negara itu juga kehilangan peluang untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien

karena tidak ada inovasi baru akibat penegakan hukum yang lemah (lack of law enforcement).

Dari kacamata relasi antara hak kepemilikan dan kerusakan lingkungan, tanpa hak milik atas sumberdaya alam yang ditegakkan, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan, tanpa rasa tanggung jawab sama sekali atas perbuatan mereka, mengeksploitasi modal secara berlebihan dengan cara, misalnya, menangkap ikan secara berlebihan, menggunakan lahan perkayuan desa secara berlebihan, dan menyedot air tanah dalam jumlah berlebihan. Tetapi, bila kelompok komunal tertentu diberi hak milik terhadap sumberdaya alam, maka kelompok tersebut akan mengembangkan mekanisme untuk membatasi akses oleh orang luar, mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan, mengalokasikan hak-hak penggunaan di antara kelompok, pemantauan dan pemenuhan/pelaksanaan. Contoh-contoh dari sistem pengelolaan sistem komunal mencakup contoh untuk hutan-hutan di Jepang;

perikanan di Turki; irigasi di India selatan; dan padang penggembalaan di pegunungan Alpen Swiss, Himalaya, dan Andes. Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa adanya kepastian terhadap hak kepemilikan akan mendonasikan kegiatan ekonomi dalam pengertian positif, yakni pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan.

Kasus Lembaga Keuangan Desa dan Subak

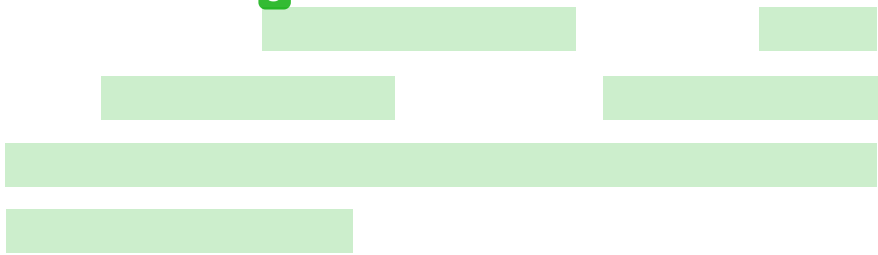
Beberapa penelitian di Bali mengenai Lembaga Keuangan Desa meliputi Bank Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyerap sistem dan adat setempat (BPR tradisional), di mana hal ini merupakan bagian penting dari modal sosial, justru memiliki kinerja lebih bagus, khususnya dalam mencegah terjadinya kredit macet. Sebaliknya, BPR yang menggunakan perangkat dan kelembagaan baku yang disodorkan oleh Bank Indonesia (BPR modern) banyak yang terjebak dengan persoalan kredit macet



5



5



percaya dengan “*karma phala*”, yaitu setiap perbuatan akan menuai hasil yang sepadan. Bila tidak membayar utang misalnya, mereka akan memperoleh hasil buruk pada kehidupan nantinya, termasuk keturunannya.

Contoh lain keberhasilan pembangunan ekonomi yang berbasis modal sosial adalah pengelolaan irigasi. Kasus manajemen irigasi merupakan sampel legendaris yang selalu dimunculkan untuk membuktikan bahwa pengelolaan irigasi yang bersandarkan kepada komunitas petani (*irrigation communities/communal irrigation/farmer-managed irrigation systems*) memiliki potensi lebih besar berhasil ketimbang dikontrol oleh lembaga pemerintah (*government agencies*). Studi yang dilakukan oleh Tang yang mencoba membandingkan 47 sistem pengelolaan irigasi menunjukkan secara jelas kinerja sistem irigasi yang dikelola oleh pemerintah (atau birokrasi) secara konsisten memiliki kinerja yang lebih rendah daripada sistem irigasi yang dikelola oleh petani/masyarakat sendiri (*local self-governing*

systems). Penilaian kinerja mencakup tiga aspek: (i) kecukupan ketersediaan air (*adequacy of water supply*); (ii) tingkat sistem perawatan (*level of system maintenance*), dan (iii) derajat penyesuaian aturan di antara petani (*degree of rule conformance among cultivators*). Temuan yang sama juga muncul dari riset di Nepal terhadap 127 sistem irigasi yang dilakukan oleh Benjamin dkk., yang menunjukkan sistem irigasi yang dikelola oleh masyarakat (*self-governing*) lebih cemerlang kinerjanya dibandingkan irigasi yang dikelola oleh pemerintah. Ukuran kinerja penelitian yang terakhir ini adalah intensitas tanam (*cropping intensity*), kekuatan teknis infrastruktur (*technical efficacy of infrastructure*), dan ketersediaan air (*water availability*).

Fakta-fakta tersebut menyodorkan pemahaman bahwa kinerja pembangunan ekonomi tidak lepas dari faktor sejarah, struktur masyarakat, dan budaya lokal. ⁵ Rentang sejarah yang panjang membentuk karakter dan nilai-nilai di masyarakat, yang selanjutnya menjadi

basis bagi mereka untuk mengatur kegiatan ekonomi, baik untuk kepentingan kolaborasi (*co-operation*) maupun kompetisi (*competition*). Hasilnya, aturan-aturan dan manajemen yang diterapkan merupakan derivasi dari nilai-nilai dan pola interaksi yang sudah terjalin sangat lama sehingga memudahkan bagi proses perencanaan, eksekusi, maupun monitoring. Dalam kasus pengelolaan irigasi, sistem berbasis komunitas bukan hanya murah biaya transaksinya (karena ada kepercayaan di antara anggota sehingga tidak perlu keluar biaya pengawasan), tetapi juga terhindar dari formalisasi regulasi yang justru memunculkan benih-benih konflik. Faktor ini yang luput diperhatikan oleh ekonomi klasik/neoklasik, yang melihat kegiatan ekonomi kalis dari faktor-faktor budaya, sosial, sejarah, dan lain-lain. Akhirnya, yang terbentang di depan mata kaum liberal (pemikir ekonomi klasik) adalah sistem privatisasi (misalnya: sumberdaya air) yang membuka ruang eksploitasi satu pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya.

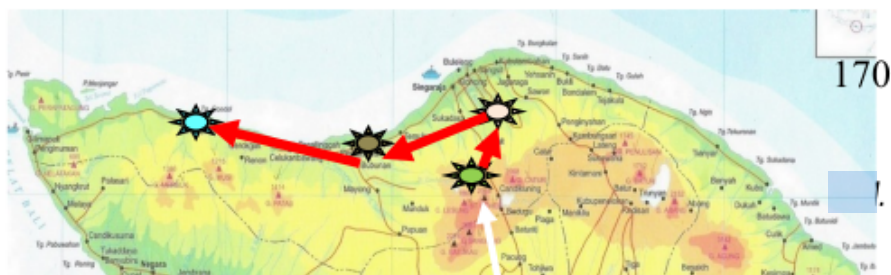
BA
B
9

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BALI: KAJA KELOD BALI YANG KURANG SEIMBANG

PENDAHULUAN

Pariwisata Bali sudah dikenal di seluruh dunia. Banyak wisatawan lebih mengenal Pulau Bali dibandingkan Indonesia. Saat berkesempatan berkunjung ke negara lain untuk menghadiri pertemuan ilmiah ataupun membangun jejaring dengan perguruan tinggi asing, seringkali menjual Bali lebih member manfaat karena lebih dikenal dan diimpikan untuk dapat dikunjungi.

Namun masih banyak orang Bali ataupun masyarakat yang tinggal di Bali kurang mengenal Bali secara keseluruhan. Ada banyak sekali tempat tempat indah yang berpotensi untuk dikunjungi ternyata lebih dikenal oleh orang asing dibandingkan pemiliknya sendiri: masyarakat Bali. Kurang mengenal milik sendiri tentunya berpengaruh pada keberadaan dan upaya upaya untuk memeliharanya.





Gambar 9.1 Pulau Bali dengan garis merah adalah potensi pengembangan agrowisata di Buleleng Utara

Bab ini akan memberi gambaran mengenai ketidakseimbangan pembangunan Bali Utara (Kaje) dan Bali selatan (Kelod) yang berdampak pada ketidakseimbangan kesejahteraan masyarakat dan munculnya kantong kantong kemiskinan di Kabupaten yang pernah menjadi ibukota Provinsi Bali.

Tujuan

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca mampu:

1. Memiliki gambaran tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Bali khususnya pembangunan Bali Utara dan Selatan.
2. Menjelaskan mengenai potensi pertanian secara luas dan pariwisata di Bali Utara khususnya Kabupaten Buleleng
3. Menjelaskan mengapa diperlukan upaya upaya menyeimbangkan pembangunan Bali Utara dan Selatan

Perencanaan Bali Kaje-Kelod: Tidak seimbang?

Bali merupakan tujuan wisata terkemuka di Indonesia yang diminati oleh seluruh wisatawan domestik hingga manca negara. ²³ Sebagai daerah tujuan wisata, Provinsi Bali secara konsisten menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan. Pengembangan industri pariwisata di Bali secara umum menerapkan konsep ²³ Pariwisata Budaya, yang secara implisit memasukkan misi ²³ menumbuh kembangkan kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya. Di sisi lain, ²³ kepariwisataan telah menjadi salah satu industri

yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali yang ditunjukkan melalui komposisi pertumbuhan perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sebesar 73.478,16 miliar rupiah dalam PDRB Bali merupakan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran atau sebesar 30,62 persen (Bali dalam Angka, 2011).

Data menunjukkan bahwa tingkat perekonomian Bali sangat bergantung pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Namun seringkali pesatnya perkembangan kepariwisataan di Bali memberi dampak negatif pula terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan alam dan perubahan-perubahan yang sangat struktural bagi masyarakat dan kebudayaan Bali.

Investasi pariwisata di Bali sangat dominan terkonsentrasi di wilayah Bali bagian selatan (Badung, Denpasar dan Gianyar) sehingga rata-rata PDRB ketiga kabupaten ini mencapai 2 (dua)

kali PDRB Kabupaten Buleleng (Bali utara). Kegiatan pariwisata di Bali selatan ini terlalu banyak diorientasikan untuk pengembangan pariwisata yang berbasis modal (*capital based tourism*). Di lain pihak, usaha-usaha pembinaan, pembangunan, pelestarian, beserta revitalisasi tradisi-keyakinan-aspirasi-budaya atau TRAC (*Tradition-Religion-Aspiration-Culture*) di desa-desa banyak terabaikan, padahal sektor kepariwisataan jelas-jelas secara langsung memanfaatkan aset TRAC yang berakar di dua lembaga sosial-religius-tradisional Desa Adat (komunitas adat di desa) dan Subak (komunitas petani yang menerima air irigasinya dari satu sumber atau bendungan tertentu). Lebih-lebih pembangunan sektor pariwisata seringkali mengorbankan sektor pertanian, seperti alih fungsi lahan pertanian, kompetisi penggunaan air antara kebutuhan untuk hotel dan restoran dengan kebutuhan untuk irigasi pertanian, derasnya perpindahan SDM pertanian di desa ke

kota dan lokasi-lokasi pengembangan pariwisata padat modal yang semakin mengancam budaya agraris dan Subak di Bali menjadi bangkrut dan tinggal kenangan.



Gambar 9.2. Point Hijau merupakan potensi pengembangan agrowisata yang memiliki keunikan sendiri, Krapu (Sumber Kima), Anggur (Seririt), Buah tropis (Sudaji) dan Strowberi (Pancasari)

Bali, merupakan pulau kecil yang memiliki kesuburan tinggi dengan keindahan alam serta keunikan *Tradition-Religion-Aspiration-Culture* masyarakatnya. Bali, seringkali harus

dihadapkan pada pilihan yang menyulitkan, yaitu mengembangkan pariwisata dan mengorbankan pertanian dan lingkungan, atau sebaliknya mempertahankan pertanian dan lingkungan dengan membatasi perkembangan pariwisata. Pilihan terbaik tentunya adalah mengembangkan pariwisata tanpa mengorbankan sektor lainnya. Salah satu alternatif yang berada pada kombinasi tersebut adalah agrowisata atau *agrotourism* yang ¹³ berarti berwisata ke daerah pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Tidak hanya dilihat dari hasilnya, namun terkait lebih luas dengan ekosistemnya bahkan lingkungan secara umum.

Padatnya investasi pariwisata di Bali Selatan sungguh bertolak belakang dengan keadaan Bali Utara khususnya Kabupaten Buleleng. Sesungguhnya, Kabupaten Buleleng

merupakan Kabupaten terluas dengan jumlah penduduk tertinggi di Bali. Ibukota Propinsi Bali sebelum dipindahkan ke Denpasar ini merupakan satu satunya kabupaten yang berada di sebelah Utara perbukitan yang melintang dari ujung Barat hingga Timur Bali.

Lokasinya yang berada di sebelah Utara Bali meninggalkan satu keunikan lain dalam penyebutan arah mata angin yaitu Kelod (Selatan) merupakan arah pantai (bagi penduduk di Selatan perbukitan adalah Utara) dan sebaliknya Kaja (Utara) merupakan arah perbukitan (bagi penduduk di selatan perbukitan adalah Selatan).

Agrowisata: suatu alternatif membangun Keseimbangan di Bali?

¹³ Haeruman (1989) menyatakan bahwa agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan sumber daya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Daerah

perkebunan, ¹³ sentra penghasil sayuran dan buah-buahan tertentu dan wilayah pedesaan berpotensi besar menjadi objek agrowisata. Potensi yang terkandung tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarananya. Dengan demikian dalam agrowisata harus diperhatikan masalah agribisnis, agropolitik, agroindustri, agroekosistem dan pertanian berkelanjutan.

Pengembangan agrowisata di Bali diyakini dapat membangun suatu sistem kegiatan terpadu dan terkoordinasi untuk mengembangkan sektor pariwisata sekaligus dengan sektor pertanian dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Berupaya mengembangkan sumber daya alam Bali yang memiliki potensi di bidang budidaya tanaman di lahan sawah dengan berbagai keunikan tradisi-keyakinan-aspirasi-budaya yang melekat pada kelembagaan tradisional-religius

Subak-nya. Begitu pula pada kegiatan di sektor peternakan rakyat dan perikanan. ¹³ Potensi yang terkandung tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarannya. Integrasi seluruh potensi tersebut akan dapat mewujudkan kawasan (Jalur) agrowisata yang sangat menarik dan laku dijual dalam bentuk paket perjalanan wisata ke manca negara.



Gambar 9.3 Danau, Kebun Stroberi dan aktivitas menanam menjadi paket menarik agrowisata di Pancasari, Bedugul, Bali

Potensi yang kuat dan unik pada beberapa destinasi kegiatan pertanian di Bali utara khususnya di daerah Buleleng bagian barat dapat diintegrasikan dengan peluang yang tinggi untuk pengembangan pariwisata menjadi suatu paket Agrowisata *Kaje-Kelod*. Konsepsinya adalah suatu Jalur destinasi pariwisata pertanian dengan karakteristik budidaya hortikultura dan ekowisatanya di daerah pegunungan di Pancasari, berlanjut ke kawasan sentra pengembangan buah tropika di daerah dataran sedang di Sudaji terus berlanjut ke kawasan budidaya anggur hitam di daerah dataran rendah dekat pesisir pantai di Tangguwisia, sampai berakhir di daerah budidaya pesisir dan laut/segare (*marinculture*) di Gerokgak. Dalam pengembangan agrowisata tersebut, tidak hanya mempersiapkan obyek wisata pertaniannya saja tetapi juga revitalisasi kegiatan fisik dan metafisik budaya agraris masyarakat pedesaan untuk dapat

menangkap nilai tambah yang diberikan oleh kegiatan agrowisata tersebut. Pengembangan Jalur Agrowisata Kaje-Kelod secara luas bertujuan: 1) memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam usaha agro (wisata agro ilmiah); 2) memperkenalkan nilai budaya dan kearifan local masyarakat setempat dalam kegiatan pertanian (wisata agro budaya); 3) memperluas hubungan usaha dan promosi produk usaha agro (wisata agro bisnis); dan 4) memperkenalkan alam dan memperluas rekreasi di bidang agro (wisata agro rekreasi).

Dipandang dari sudut pembangunan wilayah, pengembangan agrowisata akan mendorong tumbuhnya kutub kutub pertumbuhan baru sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Kutub pertumbuhan baru tersebut diharapkan dapat memberikan dampak tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang bermanfaat bagi pemerataan lapangan pekerjaan yang bermuara pada pemerataan pendapatan rumah tangga

masyarakat pedesaan (*community-based tourism*). Saat ini, tingginya kesenjangan yang terjadi di sektor pariwisata dan pertanian (akibat dominasi pembangunan *capital-based tourism*) menyebabkan timbulnya keengganan masyarakat mengembangkan sektor pertanian di Bali, sedangkan sektor pertanian ini akan menekan terjadinya kebocoran pendapatan wilayah yang diperoleh dari sektor pariwisata. Demikian pula dengan keseimbangan pembangunan Bali utara dan selatan.



Gambar 9.4 Sumber Kima, Menyimpan Potensi Laut untuk Kerapu

Melalui pengembangan Jalur Agrowisata *Kaje-Kelod* diharapkan dapat memberi keuntungan yang lebih merata kepada seluruh *stakeholders*: petani dengan lembaga Subak serta Desa adat setempat, masyarakat sekitarnya, investor, dan biro perjalanan wisata. Dengan cara ini dampak buruk dari dominasi pengembangan *capital based tourism* akan dapat dinetralisir.

Di samping itu pengembangan Jalur Agrowisata *Kaje-Kelod* akan dapat meningkatkan konservasi lingkungan. Nilai – nilai konservasi yang ditekankan yakni pada keseimbangan ekosistem. Jalur agrowisata ini diharapkan memiliki nilai – nilai *existency effect* yang berguna bagi lingkungan karena keberadaannya mempengaruhi cuaca maupun iklim di sekitarnya.

32 Meningkatkan: nilai estetika dan keindahan alam, nilai rekreasi, serta kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Para peneliti diberi kesempatan melakukan penelitian di daerah

agrowisata, dan bentuk keriasama ini sangat
be



Gambar 9.5 Potensi berbagai buah tropis di
Sudaji dan Beras Lokal

Namun pengalaman di berbagai negara, pengembangan pariwisata yang tidak merangkul komunitas yang ada di sekitarnya hanya akan membangun kesenjangan baru antara pemilik modal dan masyarakat sekitarnya. Kesenjangan ini rentan menimbulkan ketidaknyamanan yang akhirnya dapat memicu munculnya kecemburuan sosial.

Di beberapa objek wisata di Bali, pemeranan kelembagaan tradisional yang dimiliki oleh komunitas lokal menjadi salah satu faktor kekuatan bisnis pariwisata. Hal ini dikenal dengan *community based tourism*. Pengembangan agrowisata kaje-kelod mengarah pada jenis pengembangan pariwisata tersebut. Peran masyarakat lokal dioptimalkan sehingga tetesan ke bawah (*trickle down effect*) dan penyebaran ekonomi (*spread effect*) pengembangan pariwisata ini akan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.



Gambar 9.6 Anggur Buleleng disaat mulai belajar berbuah

PERLUKAH MENGEMBANGKAN BALI UTARA?

Pertanyaan tersebut muncul dalam setiap orang saat pertama kali membaca tulisan ini. Mengapa mesti memberi perhatian khusus terhadap satu satunya kabupaten yang terletak di Bali Utara ini? Jawabannya hanya satu yaitu Buleleng pernah menjadi ibukota Provinsi Bali dan memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat

bernilai dari sisi budaya maupun ekonomi. Singaraja memiliki kota tua dengan tata kota yang dibangun pada masa penjajahan. Sebagai pusat pemerintahan di Nusa Tenggara dan Bali, beberapa bangunan seharusnya dipelihara dengan baik dan dijaga nilai-nilai historisnya.

Kota Singaraja sesungguhnya memiliki karakteristik yang cukup sebagai ibukota pemerintahan karena prasarana transportasi khususnya jalan dibangun dengan lebar yang memadai. Kota ini juga menyimpan nilai karena merupakan asal dari seorang wanita yang di kemudian hari melahirkan presiden pertama Republik Indonesia (asal dari Ibunda Bung Karno). Banyak pemimpin daerah yang lahir dan di besarkan di kota tua ini.

Belajar dari tata letak dan model pengembangan kota, maka akan terlihat pola pengembangan kota yang dimulai dari kota pelabuhan kemudian dikembangkan pasar dan pusat pemerintahan serta perumahan penduduk.

Pada masa sebelumnya, Pelabuhan Buleleng merupakan satu satunya akses masyarakat Bali ke luar pulau bahkan hingga luar negeri. Namun saat ini, bangunan bangunan tua tersebut dibiarkan kosong.

Pemindahan pusat pemerintahan propinsi Bali ke Bali Selatan, Kota Singaraja seolah menjadi kota tua dan berangsur angsur mati. Pelabuhan Buleleng juga sempat menjadi saksi sejarah perlawanan masyarakat setempat melawan pemerintah Belanda. Masih ingatkah anda akan Insiden Hotel Yamato? Sebuah peristiwa bersejarah yang menunjukan keberanian Indonesia untuk merobek warna biru pada bendera belanda? Ternyata di pelabuhan Buleleng juga sempat terjadi peristiwa serupa. Untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, pada tahun 1987 pemerintah membangun tugu Yudha Mandala Tama. Sebuah tugu yang menjulang tinggi, berupa seorang

pemuda kekar menunjuk kearah lautan sambil memegang bambu runcing dengan sang merah putih pada ujungnya.

Tahun 2005, tempat ini mulai ditata dengan menambahkan beberapa taman berselimutan hijaunya rerumputan dan juga pengecatan ulang beberapa bangunan tua. Selain itu, kayu-kayu tua bekas dermaga telah diganti dengan restoran terapung. Selain menikmati panorama yang indah, berwisata di pelabuhan Buleleng dapat dinikmati dengan berbagai cara. Biasanya, pada hari minggu pagi masyarakat memanfaatkan pelabuhan untuk melakukan kegiatan olah raga ringan seperti senam, lari pagi atau sekedar menikmati segarnya udara pagi, ditemani hangatnya sinar mentari. Para mancing mania dapat menyalurkan hobinya pada beton yang menjorok ke tengah laut. Selain itu, juga tersedia tempat memancing di ujung restoran terapung. Selain memancing, panorama sunset di

pelabuhan Buleleng tak kalah indahnya dengan di pantai-pantai lain.

Pengaruh kebudayaan china sangat terasa di Kota ini. Beberapa bangunan memang menggunakan arsitek Bali yang bercampur dengan china seperti terlihat di Pura Segara yang terletak di pelabuhan ini letaknya di sebelah barat pelabuhan Buleleng, di dekat areal perkampungan bahari. Pura ini biasanya akan dipenuhi umat hindu ketika upacara melasti²⁴ diadakan dan juga ketika piodalan tiba. Di dekat pintu masuk sebelah timur pelabuhan juga terdapat sebuah *klenteng* dengan aritektur bergaya oriental yang dikenal dengan nama *Ling Gwan Kiong*. Hingga kini, *klenteng* masih aktif digunakan untuk berdoa dan tempat upacara pernikahan.

Di Buleleng terdapat pula beberapa puri yaitu tempat tinggal keluarga raja. Berbeda

dengan puri di Bali Selatan, puri di Buleleng dibangun dengan arsitektur Bali yang lebih sederhana. Tidak ada dinding yang tinggi membatasi antara puri dengan perumahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa raja raja di Bali Utara lebih merakyat dan bersahaja. Sayangnya, saat ini, puri puri telah semakin menghilang kekhasannya.

Fakta fakta ini memberi peringatan kepada kita tentang perlunya niat baik dan perhatian semua pihak, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat membangun kembali kedigjayaan singaraja sebagai kota budaya

Pendalaman Materi

1. Mengapa terjadi ketidakseimbangan pembangunan di Bali?
2. Apakah Bali Utara memiliki potensi pengembangan pariwisata?

3. Mengapa Agrowisata dikatakan sebagai alternative penyeimbang pembangunan Bali Kaje Kelod?
4. Ceritakan mengenai peluang pengembangan pariwisata Kaje-Kelod!

SUMBER KIMA: BARAT-LAUT BALI YANG TERTIDUR

BAB
10

PENDAHULUAN

Provinsi Bali memiliki panjang pantai 470 km². Sebagian besar berada di Kabupaten Buleleng (144 Km²). Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng memiliki pantai kecuali Kecamatan Busung Biu dan Sukasada. Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang yaitu 72,40 km². Di kecamatan inilah terletak Desa Sumber Kima, Desa yang memiliki potensi pengembangan Kerapu (*Grouper*).



Gambar 10.1 Pantai Utara Bali yang Tenang Berpotensi untuk Keramba Apung

Kecamatan Gerokgak terletak di arah Barat Laut Pulau Bali. Sesungguhnya, terdapat banyak objek wisata menarik di kawasan tersebut seperti Pulau Menjangan, Kuburan legenda Jayaprana di Teluk Terima, Pura Segara Rupek, Pura Pulaki serta Objek Wisata Lumba Lumba di laut utara Bali. Sumber Kima menjadi daya tarik yang masih terlelap tidur padahal aktivitas nelayan di sumber kima sangat berpotensi menjadi wisata pendidikan di sector perikanan laut dan pesisir.

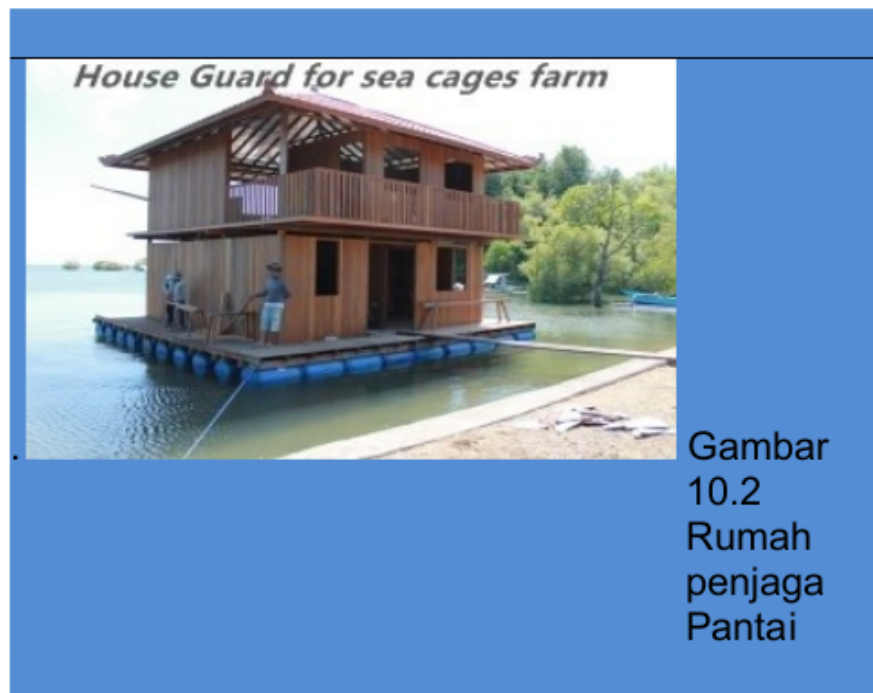
Tujuan

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca mampu:

1. Memiliki gambaran tentang potensi Laut Bali Utara serta objek wisatanya yang belum digarap
2. Menjelaskan mengenai kandungan gizi grouper
3. Menjelaskan peluang pengembangan ekonomi rakyat di Sumber kima

Sumber Kima: Sumber Air Tawar di Laut

Sejuknya angin laut terasa menyapa kulit. Indahnya pemandangan di pesisir pantai yang tenang membangunkan berbagai ide ide dan gagasan-gagasan dalam pengembangan desa yang masih terkesan tidak tersentuh pembangunan kecuali jalan aspal yang licin. Rumah rumah penduduk terlihat dalam desain yang sederhana kecuali di beberapa tempat terdapat hotel yang mewah.



Menyusuri jalan kecamatan yang lengang memang seakan-akan kita tidak berada di Bali.

Selama ini, potret Bali adalah kota yang sibuk dengan hiruk pikuk atraksi wisata disana sini. Kemacetan Kota Denpasar dan Kuta hingga Legian, sama sekali tidak terlihat di kawasan Bali Utara tersebut. Sungguh suatu pemandangan yang harus dinikmati dengan sepenuh hati.

Kecamatan Gerokgak bukan merupakan kecamatan yang setenar Ubud atau Kuta. Gerokgak adalah sebuah kecamatan yang relative tandus dan sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Salah satu desa yang memiliki potensi perikanan adalah Sumber Kima.

Desa ini memiliki keunikan karena mengalami akulturasi budaya Hindu, Islam Madura dan Islam Bugis Makasar. Proses akulturasi budaya berjalan dengan baik sehingga masing-masing kelompok saling menghormati. Penduduk mempercayai adanya suatu keajaiban yang di kemudian hari dijadikan sebagai nama desa tersebut: Sumber Kima. Nama tersebut berasal dari adanya sumber air tawar di tengah laut dan berasal dari sebuah kerang besar (Kima).

Sesungguhnya penduduk kabupaten Buleleng memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penduduk di kabupaten lainnya di Bali. Sebagai wilayah kabupaten yang pernah menjadi ibukota Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki sarana prasarana publik yang lebih memadai seperti adanya pelabuhan,

lapangan terbang, serta sekolah sekolah yang berkualitas baik.

Masyarakat Buleleng memiliki logat yang sangat kental dengan penggunaan kata kata yang sangat bersahabat. Nada bicara yang relatif tinggi namun tidak menimbulkan ketersinggungan apalagi pertengkaran adalah ciri lain dari logat orang buleleng. Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah di sepanjang pantai utara Bali, boleh jadi menjadi faktor yang membentuk karakter tersebut.

Menjelahi pedesaan di Wilayah Barat Kabupaten Buleleng memang awalnya tidak menimbulkan kekaguman yang luar biasa karena kesan pertama yang dirasakan adalah iklim yang panas dengan hembusan angin yang cukup kuat. Kesan ini akan menghilang terhembus angin setelah mengenal daerah ini dengan baik karena potensi perikanan lautnya yang sangat besar. Selain Sumber Kima, Pantai Lovina sudah terkenal ke manca negara karena lautnya yang tenang dan adanya atraksi lumba-lumba. Pemandangan bawah laut yang masih terjaga merupakan daya tarik lain dari pantai utara Bali ini.

Keberagaman suku dan agama di Gerokgak, khususnya Desa Sumber Kima patut menjadi tauladan bagi masyarakat di Bali selatan. Berbeda dengan masyarakat di Sumber Kima, di Denpasar terdapat pula kampung bugis yang hingga saat ini masih sering terjadi pergesekan

bahkan hingga menelan korban jiwa. Karakteristik masyarakat desa yang saling menghargai dengan kepatutan terhadap norma norma yang berlaku merupakan kunci kerukunan umat yang heterogen.

Keunikan desa Sumber Kima adalah adanya sumber air tawar di tengah laut. Sumber air yang ada di tengah laut umumnya akan terasa asin namun kebesaran Sang pencipta telah memberikan keajaiban dimana ada sumber air di tengah laut yang rasanya tawar. Kima adalah Kerang besar. Sumber air tawar tersebut dahulu dijaga oleh seekor kerang besar. Oleh karena itu, desa dimana terdapat sumber air tawar di tengah laut yang dijaga oleh seekor kerang besar dinamai Sumber Kima.

SUMBER KIMA: DESA NELAYAN BAGAI MUTIARA TERPENDAM

Kurang lebih satu jam perjalanan dari pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng ke arah Barat atau Sembilan puluh menit dari Objek Wisata Bedugul, maka sampailah kita di Desa Sumber Kima. Suasana desa masih relatif sepi dengan udara yang panas namun diteduhi pohon asem di sepanjang pinggir jalan utama. Sesekali terdapat kendaraan melintas di jalan lingkaran utara Pulau

Bali yang menghubungkan Kota Singaraja dan Gilimanuk.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi pada masa awal kemerdekaan, sesungguhnya Kabupaten Buleleng memiliki akses yang sangat baik. Terdapat pelabuhan, Bandar udara dan sarana jalan yang lebar dibandingkan jalan jalan di Bali Selatan. Sarana akomodasi sudah dibangun khususnya di sekitar pantai Lovina hingga ke Pemuteran. Sarana transportasi sangat memadai, atraksi wisata tersedia dalam jenis yang beragam. Selain objek wisata alam, objek wisata religi juga sangat menarik karena terdapat beberapa Pura yang memiliki peran penting dalam perjalanan agama Hindhu maupun Islam di Bali semasa jaman kerajaan Majapahit.

Hingga saat ini, objek wisata di Bali Utara kurang diminati oleh wisatawan domestik. Ada beberapa faktor yang dapat berperan dalam kemajuan pariwisata di Bali Utara khususnya Sumber Kima adalah kegiatan promosi, membangun jejaring dengan agen perjalanan, memperbaiki akses antar pulau seperti pelabuhan laut dan Bandar udara yang bersifat komersial.



Gambar 10.3 Potensi Ikan kerapu yang sudah dikembangkan masyarakat dan perlu disosialisasikan

Pendalaman Materi

1. Dimanakah lokasi pembudidayaan ikan kerapu terbesar di Bali?
2. Apakah keunggulan ikan kerapu?

3. Dapatkan aktivitas ini dikembangkan di seluruh lokasi laut di Bali?

BAB

11

***ORGANIC FARMING* UNTUK BERAS SUDAJI**

PENDAHULUAN

Sudaji adalah nama sebuah desa di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Letaknya di kaki sebuah bukit sehingga hawa sejuk akan menyapa setiap orang saat memasuki desa ini meskipun Buleleng dikenal sebagai kabupaten yang berhawa panas. Jaman dahulu, Sudaji terkenal di seluruh Bali karena produk pertanian yang berkualitas. Beras sudaji adalah beras yang mampu menghasilkan nasi bercita rasa paling baik di Bali. Buah buah tropis yang terkenal dari Sudaji rambutan, mangga, durian dan alpukat. Saat ini, kebanggaan tersebut semakin sirna. Beras sudaji sudah mulai tidak ditemukan lagi di pasar. Demikian pula dengan buah buahannya



Gambar 11.1 Lokasi Objek Agrowisata Potensial di kabupaten Buleleng yang mendukung Agrowisata Kaje-Kelod

Tujuan

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca mampu:

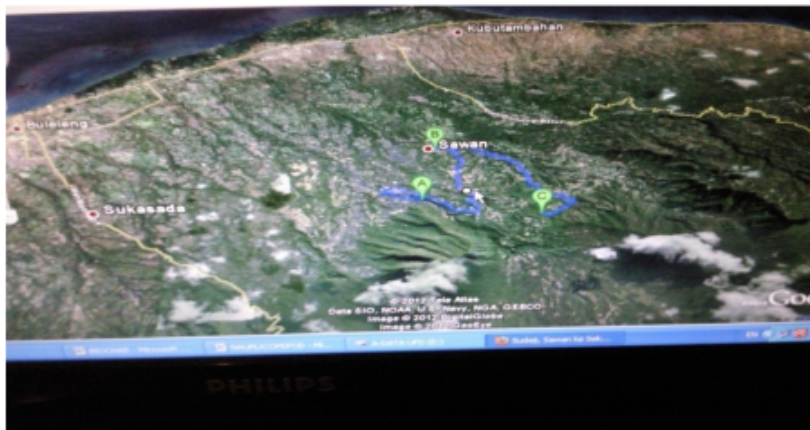
4. Memahami mengenai kejayaan varietas lokal Beras Bali dan buah-buah tropis yang dihasilkan di Bali Utara yaitu Kabupaten Buleleng.
5. Menjelaskan mengenai potensi pengembangan Beras Sudaji dan buah buahan tropis seperti mangga, rambutan, dan durian
6. Menjelaskan mengapa diperlukan upaya upaya mengembangkan pertanian di desa

Sudaji untuk mengembalikan kejayaan
buah-buah tropis dan Beras Sudaji

BERAS SUDAJI : NASIBMU KINI

Potensi yang kuat dan unik pada destinasi kegiatan pertanian terdapat di desa Sudaji, Kec. Sawan. Kab. Buleleng. Merupakan kawasan yang sangat potensil untuk pengembangan padi berkualitas tinggi dengan budaya subaknya serta sentra agribisnis buah tropika. Lokasi Desa Sudaji berjarak 9 km dari Ibu Kota Kecamatan (Keloncing); 16 km dari Ibu Kota Kabupaten (Singaraja); dan 88 km dari Ibu Kota Provinsi Bali (Denpasar). Topografi desa adalah berbukit dengan ketinggian 450 – 560 m dari permukaan laut. Daerah ini beriklim Sedang dengan curah hujan 2000 mm/tahun, temperatur antara 25-28 °C. Peta keadaan geografis Desa Sudaji dapat dilihat pada Gambar 3.2. Tampak kawasan daerah di Desa Sudaji sangat hijau dibandingkan dengan daerah lainnya, Kubutambahan, Buleleng atau Sukasada. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan pertanian di Desa Sudaji sangat subur dan memiliki sumber irigasi yang cukup melimpah sehingga sangat mendukung baik untuk pengembangan tanaman pangan padi maupun untuk buah-buahan tropis.

Sebelumnya citra Beras Sudaji di Bali sangat terkenal sebagai beras memiliki kualitas enak dan pulen, sehingga memiliki *demand* yang sangat tinggi dengan harga yang spesial tinggi. Akan tetapi, kini akibat usahatani padi yang terlalu tinggi menggunakan asupan kimia sintetis, mengakibatkan kualitas beras Sudaji menjadi menurun. Dibutuhkan berbagai upaya untuk mengembalikan citra Beras Sudaji melalui penerapan teknologi usahatani padi berbasis organik serta menggunakan varietas lokal Sudaji: *Salah Bulu*, *Cicih Gondrong*, dan *Cicih Gundil*.



Gambar 11.2 Foto Udara Keadaan Geografis Desa Sudaji dan Daerah sekitar di Kab. Buleleng

Pertanian berbasis organik diyakini dapat memberikan Kontribusi bagi pengembangan

pembangunan pedesaan. Pertanian berbasis organik secara terpadu mewakili kesempatan pada semua tingkatan, mendorong pembangunan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan. Banyak kesempatan kerja baru dapat tumbuh akibat pertumbuhan sektor pertanian berbasis organik. Dalam upaya mengefektifkan dan memanfaatkan konsepsi-konsepsi pertanian yang ramah lingkungan (berbasis organik) yang bersandar pada keragaman hayati di lahan pertanian, maka perlu dilaksanakan program peningkatan *net return* padi berbasis organik melalui dana bergulir dan pendampingan yang langsung dilaksanakan oleh komunitas petani subak di Desa Sudaji.

Peta strategi pengembangan jangka panjang padi berbasis organik di Desa Sudaji dapat dilihat pada Gambar 2. Pada tataran praktek, pengelolaan pertanian padi organik menggunakan seluruh input berkualitas organik (kecuali *starter* N dalam dosis rendah). Aspek penggunaan faktor produksi atau hubungan input output dielaborasi dengan metode ***Integrated Crop Livestock Sistem (CLS)***, untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian berbasis organik. Diseminasi pertanian berbasis organik ke masyarakat menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) yang diimplementasikan melalui pendampingan.

Tabel 11.1. Potensi Pengembangan Subak dan Agribisnis Padi Sawah di Desa Sudaji

No	Karakteristik	Keragaan 15 (lima belas) Subak			
		Nama Subak	Luas Sawah (ha)	Jumlah Petani (orang)	Produktivitas (ku/ha gkp)
1	Jumlah Subak	1) Mayungan Pitu	13	24	83
		2) Mayungan Pungakan	38	61	104
		3) Mayungan Gede	17	30	86
		4) Getih	17	28	84
		5) Juwuk	26	39	83
		6) Tehep	28	56	92
		7) Sanda	33	56	115
		8) Duku h	38	62	84
		9) Rarangan	17	38	85
		10) Lanyahan Sudaj	10	20	76

		i			
		11) Benyah	11	16	75
		12) Munduk Kauh	6	22	76
		13) Dauh yeh	15	25	78
		14) Banga Sawan	12	17	75
		15) Munduk Kangin	15	34	82
2	Luas sawah seluruh Subak	296 ha			
3	Jumlah petani seluruh Subak	528 orang			
4	Rata-rata luas lahan garapan	0,3 – 0,7 ha			
5	Status Penguasaan Lahan Sawah	60% Penyakap; 40% lahan milik sendiri			
6	Pola tanam	Sepanjang tahun padi (3 kali musim produksi)			
7	Produktivitas Padi	75 – 115 ku/ha gabah kering panen (gkp)			
8	Jenis padi	Sebelum tahun 2005 masih banyak petani yang menanam jenis padi local (<i>Salah Bulu, Cicih Gondrong, Cicih Gundil</i>), tatapi kini akibat orientasi			

		cepat, instan, dan gampang seluruh petani menanam Varietas Padi Baru (Cigelis, Impari, Ciherang dan lain-lain).
9	Teknik budidaya (organic/knvensional)	Seluruhnya konvensional (intensif menggunakan pupuk kimia sintetis)
10	Penjualan hasil panen	85% panen sendiri; 15% ditebaskan. Pemasaran luncur
11	Tingkat harga panen	Sedang

No	Karakteristik	Keragaan 15 (lima Belas) Subak
12	INFRASTRUKTUR	

	SUBAK 1) Kondisi Saluran irigasi: 2) Kondisi Jalan subak 3) Kondisi pura subak 4) Kondisi otoritas subak dalam mengatur diri 5) Besar alih fungsi lahan ke non pertanian per tahun	Bagus dan lancar Sedang Bagus Cukup tinggi Sangat rendah ($\pm 1,5$ are / tahun) sebagian besar untuk bangunan usahatani
1 3	PENERAPAN system pertanian terintegrasi/Si mantri 1) Kondisi Simantri 2) Jumlah ternak sapi 3) Kondisi pengelolaan kotoran ternak	Tidak ada Rata-rata 2 ekor/petani Sebagian besar tidak dikelola dengan baik (bahkan ada yang membuang sisa kotoran ternak babi ke saluran pengairan) Sebagian besar tidak dikelola Ada 5 unit usaha skala sedang dan kecil

	4) Pengelola an sisa panen 5) Peternak an ayam ras 6) Penyedia an pupuk organic dari pemerinth	Ada tetapi kualitasnya kurang andal bila digunakan untuk pemupukan utama di lahan sawah
1 4	Bagaimana harapan petani thd rencana program Bali Organik?	Sangat setuju tetapi dilakukan secara bertahap dan diberi pendampingan tenaga ahli yang mapan di bidang pertanian berbasis organik

Sumber: Data primer, 2012

Kolaborasi dari CLS dan PRA tersebut diharapkan dapat menghasilkan Output, yaitu beras lokal organik dan produk olahannya (Daya saing tinggi: Cita rasa, Higienis, Ramah lingkungan). Produk segar hasil beras lokal organik ini atau produk olahannya yang juga menggunakan proses produksi secara organik, akan dapat memasuki segmen pasar khusus (*niche market*) dengan harga yang lebih istimewa. Dalam jangka panjang, manakala kegiatan produksi beras organik telah bergulir dan berjalan dengan mapan maka dapat diupayakan sertifikasi indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor. Runutan seluruh detail

proses dan temuan-temuan dalam program pertanian berbasis organik ini yang tersusun secara sistematis akan menghasilkan teknologi tepat guna dengan relevansi tinggi untuk meningkatkan *net return* usahatani padi berikut kesejahteraan petaninya.



Model pelaksanaan program menggunakan paket Teknologi Budidaya Padi Berbasis Organik (P3BO Unmas) mendapat pendampingan oleh

petugas teknis dan peneliti Unmas Denpasar. Di samping itu dilakukan pemberdayaan kelembagaan subak pada aspek etik, fisik dan metafisiknya. Paket teknologi yang diintroduksi dijelaskan pada Tabel 11.2.

Tabel 11.2. Paket Teknologi Budidaya Padi Berbasis Organik (P3BO Unmas)

Aspek Teknologi	Perlakuan
Varietas	• Padi cultivar lokal <i>Cicih Gundil, Cicih Gondrong, Salah Bulu</i> • MH: varietas tahan wereng coklat, penyakit tungro, dan hawar daun bakteri. • MK: varietas yang relatif tahan kering dan tahan hama penggerek
Persemaian	• Persemaian basah, <i>seed treatment</i>: direndam air garam, abu (BJ air > 1), yang mengapung dibuang
Jumlah benih	• Tapin (tanam pindah): 30 kg/ha
Umur bibit	• 20-25 hari

Jumlah bibit/rumpun	4 - 5 batang
Cara tanam dan irigasi	- Tapin dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm dan 40 x 40 cm - Pemberian air secara terputus (<i>intermiten irrigation</i>)
Efisiensi pemupukan	- Menggunakan Bagan Warna Daun (BWD) - Penggunaan pupuk organik tabur dan penyemprotan serta <i>Starter N</i>.
Bahan organik	4,5 t/ha kompos/pupuk kandang + Biourine & agensia hayati
Pengendalian hama/penyakit	- Monitoring populasi hama per minggu - Pestisida nabati dan hayati, bila diperlukan
Penanganan panen	- Melibatkan kelompok/<i>seke manyi</i> - Panen cara beregu - Pengeringan gabah segera setelah dipanen (dengan bantuan mesin pengering / <i>dryer</i> bila cuaca ekstrim basah)



Gambar 3.3

Padi yang Menguning dan sisir angin yang sejuk membuat setiap pengunjung enggan meninggalkan desa Sawan dan Sudaji, Namun masih diperlukan polesan atraksi agar objek wisata ini semakin digemari berupa eco tracking maupun tari tradisional Buleleng



Gambar 11.4 Lokasi Desa yang berada di kaki bukit memberi paduan warna kuning dan hijau yang segar



Pendalaman Materi

5. Mengapa Beras Sudaji kalah bersaing di pasar lokal?
6. Upaya apakah yang perlu dilakukan agar komoditas buah lokal memiliki tempat di hati masyarakat
7. Buah lokal apa sajakah yang dihasilkan oleh Desa sawan dan Sudaji

ANGGUR BULELENG: MUNGKINKAH NAIK KELAS?

PENDAHULUAN

Hasil kebun yang juga menjadi andalan Kabupaten Buleleng adalah Anggur. Secara fisik, anggur Buleleng dapat dibedakan secara cepat dibandingkan anggur import karena warnanya hitam dan cenderung lebih kecil. Sesungguhnya warna hitamnya dapat menggugah selera untuk menikmatinya, namun penikmat anggur buleleng seringkali kecewa karena rasanya masam. Saat ini, kebun anggur di Buleleng terkonsentrasi di kecamatan seririt. Rasanya yang asam tersebut, menjadi salah satu faktor keengganan petani di daerah lain untuk membudidayakannya. Seringkali buah anggur segar menjadi hiasan pojok etalase karena tidak diminati. Oleh karenanya, petani menjual anggurnya kepada pengusaha minuman saja.

TUJUAN

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca mampu:

4. Memiliki gambaran Desa Tanguwisia sebagai pusat penghasil Anggur di Bali
5. Menjelaskan mengenai Karakteristik Anggur Bali
6. Menjelaskan peluang pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan Anggur Prabu Bestari



Gambar 12.1 Anggur Bali seringkali teronggok di pojok ruang karena kurang digemari

SERIRIT: DULU DAN KINI

Dulu, kecamatan seririt pernah menjadi bahan perbincangan karena hamper seluruh masyarakatnya kehilangan rumahnya karena diguncang gempa. Sebagian penduduknya mengungsi dan merasa takut untuk menetap di Seririt karena wilayahnya sangat dekat ke pantai Utara Bali. Kecamatan ini memiliki tempratur udara yang tinggi sehingga di beberapa daerahnya terkesan tandus. Pada musim kemarau, air sungai menghilang.

Lain dulu lain pula sekarang. Seririt menjadi kota kecamatan kedua di Kabupaten yang memiliki kemajuan pembangunan yang pesat. Sarana kesehatan dan pendidikan berkembang dengan semakin menguatnya ekonomi masyarakat. selain itu, adanya Pantai Lovina menjadi salah satu daya tarik wisata di Buleleng Barat yang mendorong pembangunan di berbagai sektor.

Seririt memiliki lahan pertanian yang luas, sebagian ditanami padi dan sebagian lainnya

menjadi kebun anggur atau mangga. Anggur seririt menjadi potensi utama karena Seririt merupakan satu satunya daerah di Bali yang mengembangkan perkebunan anggur. Masyarakat sering menyebut anggur yang dihasilkan di Bali dengan Anggur Buleleng.



Gambar 12.2 Kebun anggur yang telah mulai berbuah tetap harus dilakukan penyiangan

Di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan Seririt dan terus menyebar ke Kecamatan Banjar dan Gerogak yang juga memiliki kemiripan kondisi iklim, budidaya anggur banyak dijumpai dan sudah cukup lama dibudidayakan. Jenis anggur yang banyak dibudidayakan adalah varietas *Vitis vinivera* yang sesuai pada kondisi tanah sarang berkerikil, cukup kapur, optimal pada ketinggian 0-30 mdpl dan mempunyai musim kering lebih dari 3 bulan (Setiadi, 1986). Jenis tanaman ini mempunyai prospek yang cukup baik, ditinjau dari kemampuan produksi, tanaman ini dapat dipanen tiga kali dalam setahun.

Jenis anggur yang banyak terdapat di Kabupaten Buleleng adalah varietas *Vitis vinivera* yang sesuai dengan kondisi tanah sarang, berkerikil, cukup kapur, optimal dengan ketinggian 0-300 mdpl dan mempunyai musim kering lebih lama dari 3 bulan (Setiadi, 1986). Budidaya anggur di Kabupaten Buleleng sangat sesuai

dengan arahan tujuan pengembangan Bali Barat sebagai sentra hortikultura khususnya tanaman buah-buahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yaitu Perda 4/1996 Propinsi Bali (Pemda Kabupaten Buleleng 2000)



Gambar 12.3 Anggur hitam Buleleng yang memiliki rasa khas dengan tingkat keasaman tinggi

Desa Tangguwisia adalah salah satu desa pinggir pantai yang merupakan sentra budidaya anggur di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan

luas wilayah 134 km² dan sebagian besar terdiri dari tegalan yaitu 99.30 ha serta lebih dari 45 % kepala keluarga yaitu 179 KK menggantungkan hidup di bidang pertanian khususnya usaha tani buah-buahan yang didominasi pada usaha tani anggur (Kecamatan Seririt dalam Angka 2009). Produksi anggur dari 21 desa yang masuk wilayah kecamatan Seririt dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai tahun 2008 berturut-turut mencapai 11,176 ton; 11,409 ton; 11,624 ton dan 11,589 ton sedangkan desa Tangguwisia sendiri mencapai produksi hingga 1,778 ton di tahun 2008 (Laporan Dinas Pertanian Kecamatan Seririt Th. 2009).

Minat masyarakat menanam anggur tampak semakin meningkat, Minat masyarakat menanam anggur tampak semakin meningkat, hal ini disebabkan karena budidaya anggur sangat menguntungkan, juga mempunyai arti penting dalam usaha peningkatan gizi masyarakat. Disisi lain tanaman anggur mempunyai prospek yang cukup baik, ditinjau dari segi kemampuan

produksi yaitu tanaman ini dapat dipanen tiga kali dalam setahun. Persoalan mutu dan harga anggur merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai dampak langsung terhadap pihak-pihak yang terkait terutama petani sendiri. Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini maka pengembangan tanaman anggur harus berorientasi kepada peningkatan daya saing mutu produk, peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani. Untuk itu diperlukan keterpaduan program dari semua pihak baik dari Pemerintah, masyarakat dan akademisi.

Sampai saat sekarang jenis anggur yang dibudidayakan di desa Tangguwisia adalah varietas anggur hitam local *Vitis vinifera* yang mempunyai kualitas cita rasa agak masam sampai masam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan mutu atau kualitas dan selanjutnya nilai jual anggur, Hasil penelitian

sebelumnya dapat diketahui pada denplot seluas 5 are sejak tahun 2008, dari 15 pohon varietas anggur Probolinggo merah “Prabu Bestari” yang ditanam terdapat 8 pohon yang mampu tumbuh dan berproduksi baik sampai 6 kali panen hingga sekarang. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang mendukung dalam keberlanjutan budidaya anggur, maka tampak bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan jenis atau varietas anggur lain yang dapat memberikan hasil dengan mutu dan produktivitas yang lebih tinggi.

Varieta anggur Probolinggo Merah “Prabu Bestari” merupakan salah satu varietas unggul baru yang telah di SK kan melalui Keputusan Mentan RI No. 600/Kpts/SR.120/11/2007 tanggal 7 November 2007 sebagai varietas unggulan Balijestro Kebun Percobaan Banjarsari yang awalnya dengan nama Red Prince (Deptan, 2008). Varietas ini mempunyai mutu yang unggul, karakter tingkat kemanisan sampai 20 briks,

warna buah merah, produksi stabil dengan hasil cukup tinggi. Pada tanaman umur produktif (5 tahun ke atas) mampu menghasilkan buah 20 – 30 kg/pohon/tahun atau kapasitas produksi 5-15 ton/ha, umur panen 120 hari setelah pangkas produksi dan memiliki daya simpan 7-14 hari. Usahatani anggur Prabu Bestari layak untuk dikembangkan karena dengan biaya rata-rata untuk usahatani 100 tanaman anggur Prabu Bestari dalam luasan 1000 m² selama satu tahun adalah Rp 24.153.542,25 dan memberikan rata-rata pendapatan (keuntungan) usahatani untuk usahatani 100 tanaman anggur Prabu Bestari dalam luasan 1000 m² adalah dalam 1000 m² Rp 9.033.957,75/tahun serta nilai payback payment dapat dicapai setelah 5 tahun 6 bulan dengan nilai Break Event Point (BEP) sebesar 344 kg selama satu tahun atau setelah penjualan Rp 5.099.208,33 (Deptan,2008).

Saat ini, arah pengembangan anggur merah “Prabu Bestari” telah dilaksanakan dengan

tujuan mengembangkan agribisnis anggur, meningkatkan produksi dan mutu, memotivasi petani dan petugas sebagai penggerak agribisnis anggur, memperluas pengembangan sentra produksi anggur serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Desa Tangguwisia.

Pendalaman Materi

1. Dimanakah letak Kecamatan Seririt?
2. Mengapa Anggur Bali kurang diminati oleh konsumen?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggur Bali?
4. Bagaimanakah pendapat anda mengenai peluang pasar Anggur Prabu Bestari?

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Erani Yustika. 2008. *Ekonomi Kelemabagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Edisi : Kedua, Bayu Media, Malang

- Baumol, W. J. 1985. *Economic Theory and Operation Analysis*. Prentice-Hall of India, New Delhi
- Bromley, D. W. 1989. *Economic Interests and Institutions. The Conceptual Foundations of Public Policy*. Basil Blackwell. New York.
- Eggertsson, T. 2005. *Imperfect Institutions: Possibilities and Limits to Reform*, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Furubotn, E.G. and Richter, R. 2005. *Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics*, 2nd revised and extended edition, [1st ed. 1997], Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Hanna, S. and M. Munasinghe. 1995. *An Introduction to Property Rights and the Environment : Social and Ecological Issues*. The Beijer International Institute of Ecological Economics, World Bank
- Jongwook Kima and Joseph T. Mahoney. 2005. *Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management*, Managerial and Decision Economics. 26: 223–242, Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/mde.1218

Leyton-Brown, Kevin; Shoham, Yoav . 2008. *Essentials of Game Theory: A Concise, Multidisciplinary Introduction*, San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, ISBN 978-1-598-29593-1, <http://www.gtessentials.org>. An 88-page mathematical introduction; see Chapter 2.

Lilis Widaningsih. 2009. Konflik ruang publik dan penguatan modal sosial (sosial capital) masyarakat kampung kota (*Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung*) Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia

Rao, P.K. 2003. *The Economics of Transaction Costs, Theory, Methods and Applications*. New York: Palgrave Macmillan.

Samuels, Warren J. 1988. *Institutional Economics*, Vol II. England: Edward Elgar.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan Haris Munandar dan Puji A.L. Jakarta: Erlangga

Teori dan Aplikasi EKONOMI KELEMBAGAAN bagi Perencana Pembangunan

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dokumen.tips

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

1%

3

Submitted to Universitas Hang Tuah
Surabaya

Student Paper

1%

4

Submitted to Universitas Papua

Student Paper

1%

5

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

6

Submitted to Universidad Francisco de
Paula Santander

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

1%

8

Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat

Student Paper

1%

9

Submitted to Ajou University Graduate
School

Student Paper

1%

10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
11	Submitted to Ironwood High School Student Paper	<1 %
12	Submitted to University of Liverpool Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
14	Submitted to Green Hope High School Student Paper	<1 %
15	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
16	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper	<1 %
20	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %

21	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
22	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1 %
23	Putu Ade Wijana, Ni Made Hartini, Nuning Kurniawati. "STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN HUNIAN KAMAR DI ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 PADA THE PAYOGAN VILLA RESORT & SPA KEDEWATAN UBUD GIANYAR", Journal of Applied Management Studies, 2022 Publication	<1 %
24	Ni Komang Ayu Astiti. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN PELABUHAN-PELABUHAN KUNO DI BULELENG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA", Forum Arkeologi, 2018 Publication	<1 %
25	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
26	Submitted to British School of Commerce - Colombo Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
28	NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO. "KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF	<1 %

EKONOMI POLITIK ISLAM",
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam,
2018

Publication

-
- | | | |
|---|---|----------------|
| <div style="background-color: #008000; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">29</div> | <p>Putu Eka Wirawan, I Made Sudjana, A.A. Ayu Arun Suwi Arianty, I Gusti Suka Arnawa, Komang Ratih Tunjungsari. "Training on processing Buleleng local wine into sustainable culinary tourism products in Banjar Village, Buleleng", Community Empowerment, 2021</p> <p>Publication</p> | <p><1 %</p> |
|---|---|----------------|
-
- | | | |
|---|--|----------------|
| <div style="background-color: #8B4513; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">30</div> | <p>Submitted to Universitas Warmadewa</p> <p>Student Paper</p> | <p><1 %</p> |
|---|--|----------------|
-
- | | | |
|---|--|----------------|
| <div style="background-color: #8B4513; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">31</div> | <p>Submitted to Yayasan Vitka</p> <p>Student Paper</p> | <p><1 %</p> |
|---|--|----------------|
-
- | | | |
|---|--|----------------|
| <div style="background-color: #003366; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">32</div> | <p>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</p> <p>Student Paper</p> | <p><1 %</p> |
|---|--|----------------|
-
- | | | |
|---|---|----------------|
| <div style="background-color: #800080; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">33</div> | <p>Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p> <p>Student Paper</p> | <p><1 %</p> |
|---|---|----------------|
-
- | | | |
|---|---|----------------|
| <div style="background-color: #6B8E23; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">34</div> | <p>Submitted to Universitas Pelita Harapan</p> <p>Student Paper</p> | <p><1 %</p> |
|---|---|----------------|
-
- | | | |
|---|--|----------------|
| <div style="background-color: #00008B; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">35</div> | <p>Darwanto Darwanto. "STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS EKONOMI KELEMBAGAAN", INFERENSI, 2014</p> <p>Publication</p> | <p><1 %</p> |
|---|--|----------------|
-

36	Indah Permata Sari, Retno A. Ekaputri. "BUMDES DI KECAMATAN KABAWETAN : KAJIAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT", Convergence: The Journal of Economic Development, 2020 Publication	<1 %
37	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
38	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
39	Submitted to Rhodes University Student Paper	<1 %
40	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
41	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	<1 %
42	Made Ika Prastyadewi, Agus Suman, Devanto Shasta Pratomo. "Labor Absorption and Its Impact on Gross Regional Domestic Product", Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 2013 Publication	<1 %
43	Rob Whitley. "Social Capital and Psychiatry: Review of the Literature", Harvard Review of Psychiatry, 3/1/2005 Publication	<1 %

44

Submitted to Universitas Islam Bandung

Student Paper

<1 %

45

I Wayan Suharta. "Makna Balaganjur Dalam Aktivitas Sosial Masyarakat Bali", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2021

Publication

<1 %

46

Suyatno Suyatno. "Front Matter", Jurnal Riset Akuakultur, 2011

Publication

<1 %

47

Asfaruddin Asfaruddin, Sunarti Sunarti, Tenzi Mardalena. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021

Publication

<1 %

48

Aswatini Raharto. "PENANGGULANGAN COVID-19 DALAM KERANGKA TEORI KEPENDUDUKAN MALTHUS", Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020

Publication

<1 %

49

Nyoman Utari Vipriyanti, Dewa Ayu Puspawati, Putu Lasmi Yulianthi Sapanca, Made Emy Handayani Citra. "Model Penguatan Subak di Era New Normal: Analisis Peran Collective Action pada Penerapan Sistem Terintegrasi Itik Padi di Tabanan-Bali", Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian, 2020

Publication

<1 %

50

Sofyan Sulaiman. "MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019

Publication

<1 %

51

Waldstrom, C.. "On the capitalization and cultivation of social capital: Towards a neo-capital general science?", Journal of Socio-Economics, 200808

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On